

BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK
TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 ayat (3) huruf c dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah kabupaten/kota sesuai wilayah administrasinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tobadak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK TAHUN 2023–2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
3. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
9. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai

kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah adalah upaya mewujudkan tertib Tata Ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang, yang dilaksanakan melalui pengaturan Zonasi, mekanisme perizinan, pemberian Insentif dan Disinsentif, dan pengenaan sanksi.
18. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan Pemanfaatan Ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan Zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan Insentif dan Disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.

19. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

20. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

21. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.

22. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah merupakan Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, Rencana Pola Ruang wilayah kabupaten, penetapan Kawasan strategis kabupaten, arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten.

23. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan PZ yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah dengan peta skala 1:5.000.

24. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

25. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.

26. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.

27. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang

sama dengan blok peruntukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

28. Zona adalah Kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
29. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
30. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
31. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
32. Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
33. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
34. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberi rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
35. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
36. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan masyarakat.
37. Kelembagaan adalah suatu badan koordinasi

penataan ruang yang dapat memfasilitasi dan memediasi kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu dengan tetap memperhatikan kaidah dan kriteria penataan ruang secara konsisten dan berkesinambungan.

38. Forum Penataan Ruang adalah wadah ditingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
39. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
40. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaran Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. tujuan penataan WP;
b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;
d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
e. PZ; dan
f. Kelembagaan.

Pasal 3

(1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tobadak ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas keseluruhan kurang lebih 2.707,33 (dua ribu tujuh ratus tujuh koma tiga tiga) hektare, beserta ruang udara di atasnya, ruang perairan dan ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Batas WP Kawasan Perkotaan Tobadak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sebelah utara berbatasan dengan sebagian Desa Waeputeh dan sebagian Desa Kabubu;

b. sebelah selatan berbatasan dengan sebagian Desa Babana dan sebagian Desa Tobadak;

c. sebelah barat berbatasan dengan sebagian Desa Pangalloang dan sebagian Desa Tabolang; dan

d. sebelah timur berbatasan dengan sebagian Desa Tobadak dan sebagian Desa Tabolang.

(3) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tobadak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif meliputi:

a. sebagian Desa Tobadak di Kecamatan Tobadak;

b. sebagian Desa Babana di Kecamatan Budong-Budong; dan

c. Desa Topoyo, sebagian Desa Kabubu, sebagian Desa Waeputeh, sebagian Desa Paraili, dan sebagian Desa Pangalloang di Kecamatan Topoyo.

(4) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tobadak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP meliputi:

a. SWP I.A mencakup sebagian Desa Tobadak, sebagian Desa Babana, dan sebagian Desa Pangalloang terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;

b. SWP I.B mencakup sebagian Desa Topoyo, sebagian Desa Paraili, dan sebagian Desa Pangalloang, terdiri atas Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

c. SWP I.C mencakup sebagian Desa Topoyo, sebagian Desa Kabubu, sebagian Desa Waeputeh, dan sebagian Desa Paraili terdiri atas Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

(5) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tobadak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan Tobadak, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri

dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan pembangunan Kawasan Perkotaan Tobadak yang berwawasan lingkungan, mandiri, berdaulat, dan sejahtera berlandaskan kearifan lokal dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a. rencana pengembangan pusat pelayanan;

b. rencana jaringan transportasi; dan

c. rencana jaringan prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a. pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan;

b. sub pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan; dan

c. pusat pelayanan lingkungan.

(2) Pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

(3) Sub pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:

a. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Babana terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;

b. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Tobadak terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;

c. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Topoyo terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan

d. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Waeputeh terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.

(4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. pusat lingkungan Kecamatan;

b. pusat lingkungan kelurahan/Desa; dan

(5) Pusat lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi Pusat Lingkungan Kecamatan Topoyo terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.

(6) Pusat lingkungan kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:

a. Pusat Lingkungan Desa Babana terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;

b. Pusat Lingkungan Desa Tobadak terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;

c. Pusat Lingkungan Desa Pangalloang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan

d. Pusat Lingkungan Desa Topoyo terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.

(7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

a. jalan umum;

b. jalan tol;

c. terminal penumpang; dan

d. jembatan.

(2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Jalan Umum

Pasal 8

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

a. jalan arteri primer;

b. jalan kolektor primer;

c. jalan kolektor sekunder;

d. jalan lokal primer;

e. jalan lokal sekunder; dan

f. jalan lingkungan sekunder.

(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Karossa – Topoyo melintas di SWP I.C; dan

b. Topoyo - Tarailu melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

(3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Akses Pelabuhan Budong-Budong (Polohu-Babana-Pelabuhan) melintas di SWP I.A; dan

b. Jalan Nasional - Mahahe melintas di SWP I.A.

(4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Topoyo - Tumbu melintas di SWP I.B dan SWP I.C.

(5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. Jalan Nasional-Pangalloang-Patulana melintas di SWP I.B;

b. Dalam KTM Tobadak melintas di SWP I.A;

c. Jalan Pasar Baru melintas di SWP I.C;

d. Paraili - Kabubu melintas di SWP I.C;

e. Sekoci - Paraili melintas di SWP I.B dan SWP I.C;

f. Waeputeh - Bayor melintas di SWP I.B dan SWP I.C;

g. Waeputeh - Tappilina melintas di SWP I.C; dan

h. jalan lokal primer lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

(6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di:

a. Dalam Kota Topoyo melintas di SWP I.B;

b. Dalam KTM Tobadak melintas di SWP I.A;

c. Jalan Nasional - Lembah Deko melintas di SWP I.C;

d. Jalan Nasional - Penghubung Pasar Baru melintas di SWP I.C;

e. Jalan Penghubung Akses Pasar Baru melintas di SWP I.C;

f. Jalan Penghubung Dusun Ngapaboa melintas di SWP I.C;

g. Pasar Baru - Waeputeh melintas di SWP I.C;

h. Pasar Lama - Paraili melintas di SWP I.B dan SWP I.C;

i. jalan lokal sekunder lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

(7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, , meliputi:

a. Benteng – Kondosapata melintas di SWP I.A;

b. Jalan Dusun Benteng melintas di SWP I.A;

c. Topoyo - Tobadak melintas di SWP I.A;

d. Waeputeh - Salupangkang IV melintas di SWP I.C; dan

e. jalan lingkungan sekunder lainnya melintas di di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

Paragraf 3

Jalan Tol

Pasal 9

(1) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi Jalan Tol Mamuju-Palu.

(2) Trase jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Terminal Penumpang

Pasal 10

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

a. terminal penumpang tipe B; dan

b. terminal penumpang tipe C.

(2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Terminal Penumpang Tipe B Mamuju Tengah terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

(3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Terminal Penumpang Tipe C Topoyo terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 5

Jembatan

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:

a. Jembatan Sungai Bulurembu terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;

b. Jembatan Budong-Budong terdapat di:

   1. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan

   2. SWP I.C pada Blok I.C.1.

c. JB1 045 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

a. rencana jaringan energi;

b. rencana jaringan telekomunikasi;

c. rencana jaringan sumber daya air;

d. rencana jaringan air minum;

e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

f. rencana jaringan persampahan;

g. rencana jaringan drainase; dan

h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Energi

Pasal 13

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;

b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan

c. gardu listrik

(2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV PLTU Mamuju–Topoyo melintas di SWP I.A.

(3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

(4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. gardu hubung terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;

2. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan

3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

b. gardu distribusi terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;

2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

(5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

a. jaringan tetap;

b. jaringan bergerak terestrial; dan

c. jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. jaringan serat optik melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;

b. sentral telepon otomat (STO) terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;

c. kotak pembagi terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;

2. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan

3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

(3) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi stasiun transmisi (sistem televisi) terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan

b. SWP I.C pada Blok I.C.2.

(4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.2;

b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

(5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi sistem pengendalian banjir.

(2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan pengendalian banjir berupa tanggul sungai melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

(3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 16

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. unit air baku meliputi:

1. bangunan pengambil air baku terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan

2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP I.A.

b. unit produksi meliputi instalasi produksi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan

c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

(3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 17

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi:

a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;

b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan

c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

(2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan

b. SWP I.C pada Blok I.C.1.

(3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi subsistem pengolahan terpusat berupa IPAL skala Kawasan tertentu/permukiman terdapat di:

a. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan

b. SWP I.C pada Blok I.C.2.

(4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan

b. SWP I.C pada Blok I.C.1.

(5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 18

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi:

a. stasiun peralihan antara (SPA);

b. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan

c. tempat penampungan sementara (TPS).

(2) Stasiun peralihan antara (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

(3) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

(4) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan

b. SWP I.C pada Blok I.C.2.

(5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 19

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g meliputi:

a. jaringan drainase primer;

b. jaringan drainase sekunder;

c. jaringan drainase tersier; dan

d. bangunan peresapan (kolam retensi).

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

(5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

(6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h meliputi:

a. jalur evakuasi bencana;

b. tempat evakuasi;

c. jalur sepeda; dan

d. jaringan pejalan kaki.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Topoyo – Tarailu melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;

b. Karossa – Topoyo melintas di SWP I.C;

c. Akses Pelabuhan Budong-Budong (Polohu-Babana-Pelabuhan) melintas di SWP I.A;

d. Jalan Nasional – Mahahe melintas di SWP I.A;

e. Topoyo - Tumbu melintas di SWP I.B dan SWP I.C;

f. Dalam KTM Tobadak melintas di SWP I.A;

g. Jalan Nasional-Pangalloang-Patulana melintas di SWP I.B;

h. Jalan Pasar Baru melintas di SWP I.C;

i. Jalan Penghubung Dusun Ngapaboa melintas di SWP I.C;

j. Paraili – Kabubu melintas di SWP I.C;

k. Pasar Baru – Waeputeh melintas di SWP I.C;

l. Waeputeh – Bayor melintas di SWP I.B dan SWP I.C;

m. Waeputeh – Tappilina melintas di SWP I.C;

n. Topoyo-Tobadak melintas di SWP I.A; dan

o. jalur evakuasi lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. tempat evakuasi sementara; dan

b. tempat evakuasi akhir.

(4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di:

a. Lapangan Babana terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;

b. gedung lapangan futsal terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;

c. Lapangan Kantor Bupati Mamuju Tengah terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;

d. lahan terbuka terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.3;

2. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan

3. SWP I.C pada Blok I.C.2.

e. perkebunan terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.3;

2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

3. SWP I.C pada Blok I.C.1.

(5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

a. RSUD Kabupaten Mamuju Tengah terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;

b. Mesjid Raya Nurul Hidayah terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan

c. SMAN 1 Topoyo terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.

(6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Topoyo – Tarailu melintas di SWP I.A;

b. Karossa – Topoyo melintas di SWP I.C;

c. Akses Pelabuhan Budong-Budong (Polohu-Babana-Pelabuhan) melintas di SWP I.A;

d. Jalan Nasional – Mahahe melintas di SWP I.A;

e. Topoyo – Tumbu melintas di SWP I.C;

f. Dalam KTM Tobadak melintas di SWP I.A;

g. Jalan Nasional-Pangalloang-Patulana melintas di SWP I.B;

h. Jalan Pasar Baru melintas di SWP I.C;

i. Jalan Penghubung Dusun Ngapaboa melintas di SWP I.C;

j. Paraili – Kabubu melintas di SWP I.C;

k. Pasar Baru – Waeputeh melintas di SWP I.C;

l. Waeputeh – Bayor melintas di SWP I.B;

m. Waeputeh – Tappilina melintas di SWP I.C;

n. Dalam Kota Topoyo melintas di SWP I.B;

o. Jalan Dusun Benteng melintas di SWP I.A;

p. Jalan Nasional - Lembah Deko melintas di SWP I.C;

q. Jalan Nasional-Penghubung Pasar Baru melintas di SWP I.C;

r. Jalan Penghubung Akses Pasar Baru melintas di SWP I.C;

s. Pasar Lama – Paraili melintas di SWP I.B dan SWP I.C;

t. Sekoci - Paraili melintas di SWP I.B dan SWP I.C; dan

u. jalur sepeda lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

(7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. Topoyo – Tarailu melintas di SWP I.A;

b. Karossa – Topoyo melintas di SWP I.C;

c. Akses Pelabuhan Budong-Budong (Polohu-Babana-Pelabuhan) melintas di SWP I.A;

d. Jalan Nasional – Mahahe melintas di SWP I.A;

e. Topoyo – Tumbu melintas di SWP I.C;

f. Dalam KTM Tobadak melintas di SWP I.A;

g. Jalan Nasional-Pangalloang-Patulana melintas di SWP I.B;

h. Jalan Pasar Baru melintas di SWP I.C;

i. Jalan Penghubung Dusun Ngapaboa melintas di SWP I.C;

j. Paraili – Kabubu melintas di SWP I.C;

k. Pasar Baru – Waeputeh melintas di SWP I.C;

l. Waeputeh – Bayor melintas di SWP I.B;

m. Waeputeh – Tappilina melintas di SWP I.C;

n. Dalam Kota Topoyo melintas di SWP I.B;

o. Jalan Dusun Benteng melintas di SWP I.A;

p. Jalan Nasional - Lembah Deko melintas di SWP I.C;

q. Jalan Nasional-Penghubung Pasar Baru melintas di SWP I.C;

r. Jalan Penghubung Akses Pasar Baru melintas di SWP I.C;

s. Pasar Lama – Paraili melintas di SWP I.B dan SWP I.C;

t. Sekoci - Paraili melintas di SWP I.B dan SWP I.C; dan

u. jaringan pejalan kaki melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

(8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

a. Zona Lindung; dan

b. Zona Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi:

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan

b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;

c. Zona badan air dengan kode BA

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 23

(1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan luas 36,24 (tiga puluh enam koma dua empat) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.

(2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 36,24 (tiga puluh enam koma dua empat) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 24

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dengan luas 74,23 (tujuh puluh empat koma dua tiga) hektare terdiri atas:

a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;

b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;

c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;

d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan

e. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

(2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 34,89 (tiga puluh empat koma delapan sembilan) hektare terdapat di:

a. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan

b. SWP I.C pada Blok 1.C.1.

(3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan

luas 31,49 (tiga puluh satu koma empat sembilan) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan

b. SWP I.B pada Blok I.B.2.

(4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 4,38 (empat koma tiga delapan) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;

b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

(5) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,24 (nol koma dua empat) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

(6) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 3,23 (tiga koma dua tiga) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

Paragraf 4

Zona Badan Air

Pasal 25

(1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dengan luas 134,24 (seratus tiga puluh empat koma dua empat) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.

(2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 134,24 (seratus tiga puluh empat koma dua empat) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Bagian Kedua

Zona Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi:

a. Zona pertanian dengan kode P;

b. Zona perumahan dengan kode R;

c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;

d. Zona campuran dengan kode C;

e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;

f. Zona perkantoran dengan kode KT;

g. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;

h. Zona transportasi dengan kode TR; dan

i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2

Zona Pertanian

Pasal 27

(1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 329,33 (tiga ratus dua puluh sembilan koma tiga tiga) hektare berupa Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.

(2) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 329,33 (tiga ratus dua puluh sembilan koma tiga tiga) hektare terdapat di:

    a. SWP I.A pada Blok I.A.1;

    b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan

    c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 3

Zona Perumahan

Pasal 28

(1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan luas 1.448,26 (seribu empat ratus empat puluh delapan koma dua enam) hektare meliputi:

a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;

b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;

c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4; dan

(2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 41,06 (empat puluh satu koma nol enam) hektare terdapat di:

a. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan

b. SWP I.C pada Blok I.C.1.

(3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.167,22 (seribu seratus enam puluh tujuh koma dua dua) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

(4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 239,99 (dua ratus tiga puluh sembilan koma sembilan sembilan) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 4

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 29

(1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas 137,17 (seratus tiga puluh tujuh koma satu tujuh) meliputi:

a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

b. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan

c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.

(2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 25,66 (dua puluh lima koma enam enam) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.3;

b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

(3) Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 86,02 (delapan puluh enam koma nol dua) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

(4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 25,49 (dua puluh lima koma empat sembilan) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 5

Zona Campuran

Pasal 30

(1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 222,99 (dua ratus dua puluh dua koma sembilan sembilan) hektare berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.

(2) Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 222,99 (dua ratus dua puluh dua koma sembilan sembilan) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 6

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 31

(1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dengan luas 106,38 (seratus enam koma tiga delapan) meliputi:

a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; dan

b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2.

(2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 41,06 (empat puluh satu koma nol enam) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

(3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 65,32 (enam puluh lima koma tiga dua) hektare

terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 7

Zona Perkantoran

Pasal 32

(1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dengan luas 68,11 (enam puluh delapan koma satu satu) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.

(2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT dengan luas 68,11 (enam puluh delapan koma satu satu) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan

b. SWP I.B pada Blok I.B.2.

Paragraf 8

Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 33

(1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.

(2) Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 9

Zona Transportasi

Pasal 34

(1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dengan luas 1,14 (satu koma satu empat) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.

(2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,14 (satu koma satu empat) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Paragraf 10

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

(1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i dengan luas 2,59 (dua koma lima sembilan) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

(2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,59 (dua koma lima sembilan) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok 1.A.3.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Tobadak.

(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. pelaksanaan KKKPR; dan

b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

(1) Pelaksanaan KKKPR di Kawasan Perkotaan Tobadak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan KKKPR.

(3) Hasil penilaian pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 38

(1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan pengembangan program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan yang terdiri atas:

a. program perwujudan;

b. lokasi;

c. sumber pendanaan;

d. instansi pelaksana; dan

e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

(2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat;

c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh:

a. kementerian/lembaga;

b. perangkat daerah;

c. swasta;

d. Masyarakat; dan/atau

e. pemangku kepentingan lainnya.

(6) Waktu dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a. tahap I pada periode tahun 2023 sampai 2024;

b. tahap II pada periode tahun 2025 sampai 2029;

c. tahap III pada periode tahun 2030 sampai 2034;

d. tahap IV pada periode tahun 2035 sampai 2039; dan

e. tahap V pada periode tahun 2040 sampai 2042.

(7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi aturan dasar.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
c. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
e. ketentuan khusus; dan
f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 41

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri atas;

a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;

b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;

c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan

d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. klasifikasi T1 berupa pembatasan pengoperasian kegiatan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan, dapat berupa:

1. waktu operasi, berupa durasi dan/atau jam operasi kegiatan;

2. pembatasan intensitas kegiatan, berupa jumlah tenaga kerja dan/atau sarana prasarana yang dipergunakan;

3. pengembangan dan peningkatan kapasitas kegiatan atau usaha lebih lanjut tidak diperkenankan;

4. pembatasan waktu pemanfaatan lahan; dan

5. pembatasan penggunaan, pemanfaatan dan pelayanan utilitas, berupa air bersih, air minum, air limbah, persampahan, listrik, telekomunikasi, dan lainnya, yang harus terukur dan tidak menimbulkan gangguan terhadap pengguna layanan utilitas publik lainnya di lingkungan sekitarnya.

b. klasifikasi T2 berupa pembatasan intensitas ruang atau luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam kavling tanah, dengan tujuan untuk mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya, dapat berupa:

1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);

2. koefisien dasar hijau (KDH) minimal dinaikkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen); dan

3. pembatasan atau perubahan luasan dan penurunan ketentuan tata bangunan yang dapat meliputi luasan kavling minimal menjadi lebih luas atau menjadi lebih kecil, garis sempadan bangunan atau jarak bebas bangunan dinaikkan atau ditingkatkan.

c. klasifikasi T3 berupa pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus yang meliputi:

1. jumlah maksimal dibatasi hanya 1 (satu) kegiatan atau usaha untuk setiap sub Blok atau satuan unit lingkungan terkecil yang disetujui bersama masyarakat setempat dan pemerintah daerah; dan

2. kajian dengan kegiatan lain yang serupa, sejenis, dan sama di sub Blok, atau lingkungan sekitarnya.

(4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan atau diizinkan secara bersyarat atau memiliki persyaratan yang harus dipenuhi dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko dampak yang besar terhadap lingkungan sekitarnya melalui pengelolaan, inovasi atau rekayasa dengan ketentuan sebagai berikut:

a. klasifikasi B1 untuk kegiatan yang wajib melakukan kajian dan persetujuan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta rekomendasi institusi/forum yang berkaitan sesuai dengan peraturan perundangan;

b. klasifikasi B2 kesesuaian wajib terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang bangunan, konstruksi, kesehatan dan pengelolaan lingkungan, pengamanan dan kebencanaan, keadilan sosial, dan pengembangan ekonomi;

c. klasifikasi B3 untuk kegiatan yang dikenakan disinsentif berupa biaya dampak pembangunan, dapat berupa:

   1. biaya sosial kesehatan, berupa asuransi; jiwa, kesehatan, kebakaran, kecelakaan dan lainnya sesuai penilaian dan kebutuhan;

   2. biaya lingkungan, berupa biaya jaminan atau garansi lingkungan untuk pemulihan dan penanggulangan dampak, dan lainnya sesuai penilaian dan kebutuhan); dan

   3. penyediaan prasarana sarana lebih dari yang diwajibkan dan disarankan untuk mendukung kegiatan sehingga dapat menghilangkan atau meminimalkan dan mengurangi dampak negatif menjadi lebih kecil dan dapat diabaikan.

d. klasifikasi B4 diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana, prasarana dan/atau ketentuan khusus lainnya yang dapat meminimalisir banjir atau genangan perkotaan seperti lubang biopori, sumur resapan dan/atau kolam injeksi;

e. klasifikasi B5 diizinkan dengan syarat wajib menyediakan ruang terbuka hijau dan/atau kegiatan dengan konsep ramah lingkungan yang dapat membantu nilai kualitas ruang terbuka hijau seperti penyediaan taman vertikal, *roof garden* dan sebagainya berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis terkait.

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Zona Lindung; dan

b. Zona Budi Daya.

(7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;

b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:

1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;

2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;

3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;

4. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan

5. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

c. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.

(8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:

a. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3;

b. Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan

3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.

c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

2. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan

3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.

d. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.

e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:

1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; dan
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2.

f. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;

g. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;

h. Zona transportasi dengan kode TR; dan

i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

(9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 huruf b merupakan ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada Zona atau Sub-Zona meliputi:

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;

b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;

c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;

d. luas kaveling minimum; dan

e. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 43

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 40 huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, basaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub-Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan meliputi:

a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;

b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;

c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan

d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.

(2) Struktur bangunan gedung diatas dua lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 44

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.

(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus

Pasal 45

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e terdiri atas:

a. Kawasan rawan bencana;

b. tempat evakuasi bencana; dan

c. Kawasan sempadan.

Pasal 46

(1) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi.

(2) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan meliputi:

   a. mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;

   b. struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir;

   c. menggunakan sekat penahan anti air untuk menahan air masuk ke bangunan atau ke lingkungan permukiman;

   d. bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara ketika banjir datang, dilengkapi dengan akses tangga darurat dan/atau akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi;

   e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan biopori, sumur resapan dan/atau kolam retensi untuk kegiatan kompleks perumahan atau bangunan non tunggal;

   f. penyediaan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas lahan untuk kegiatan kompleks perumahan atau bangunan non tunggal;

   g. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Budi Daya terbangun meliputi:

      1. koefisien dasar bangunan maksimum dikurangi sebesar 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar

Zona dan/atau Sub-Zona; dan

2. koefisien dasar hijau minimum ditambah sebesar 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar Zona dan/atau Sub-Zona.

h. RTNH menggunakan perkerasan yang mudah meresapkan air ke dalam tanah;

i. setiap bangunan wajib menyediakan biopori atau sumur resapan;

j. menyediakan ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi dan kendaraan evakuasi; dan

k. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.

(3) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan

2. SWP I.C pada Blok I.C.1.

b. Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:

a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;

b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

c) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:

a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;

b) SWP I.B pada Blok 1.B.1; dan

c) SWP I.C pada Blok I.C.1.

c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1

terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;

2. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:

   a) SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan

   b) SWP I.C pada Blok I.C.1

3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:

   a) SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan

   b) SWP I.C pada Blok I.C.1.

d. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3.

e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:

1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.

f. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3.

(4) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

(1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:

a. tempat evakuasi sementara; dan

b. tempat evakuasi akhir.

(2) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan meliputi:

a. tempat evakuasi sementara (TES) merupakan ruang penyelamatan diri *(escape building)* dan berfungsi sebagai tempat berkumpul *(assembly point)* penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke tempat evakuasi akhir (TEA) meliputi:

    1. pemanfaatan ruang pada TES diatur dengan ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar;
    2. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit;
    3. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 – 600 m (empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
    4. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
    5. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
    6. TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertikal (TEV).

b. tempat evakuasi akhir (TEA) merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu meliputi:

    1. pemanfaatan ruang pada TES diatur dengan ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum diturunkan sebesar minimal 10% (sepuluh persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen) dari aturan dasar;
    2. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
    3. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (*escape road*);
    4. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m^2/orang (tiga meter persegi per orang);
    5. ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik, dan lainnya yang mencukupi;
    6. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan

7. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, dan satelit).

(3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tempat evakuasi sementara meliputi:

a. Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:

a) SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan

b) SWP I.C pada Blok I.C.2.

2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:

a) SWP I.B pada Blok I.B.2; dan

b) SWP I.C pada Blok I.C.1.

b. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;

c. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan

d. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

(4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi akhir meliputi Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.3;

b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

(5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 48

(1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:

a. sempadan sungai; dan

b. sempadan ketenagalistrikan.

(2) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan meliputi:

a. sempadan sungai meliputi:

1. pemanfaatan ruang pada sempadan sungai wajib menyediakan ruang untuk jalan inspkesi;

2. ketentuan lebar sempadan sungai dalam kawasan perkotaan ditetapkan 3 (tiga) meter;

3. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan sungai;

4. (tambahkan batasan bangunan dari tanggul);

5. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;

6. menyediakan akses publik menuju dan di sepanjang sungai; dan

7. melakukan proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana banjir dan/atau konservasi sungai untuk mengembalikan batas sempadan sungai minimal yang diperuntukkan sebagai kegiatan ruang perlindungan setempat dan pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana banjir.

b. sempadan ketenagalistrikan meliputi:

1. ruang bebas minimum dari sumbu vertikal menara meliputi SUTT 150 (seratus lima puluh) kV PLTU Mamuju-Topoyo memiliki ketentuan jarak bebas minimum horizontal sebesar 10 (sepuluh) meter dari sumbu vertikal menara dan jarak bebas minimum vertikal dari konduktor 5 (lima) meter dari lokasi bangunan, tanaman dan perkebunan (nilai beragam tergantung objek yang ada saluran).

2. material menara menggunakan bahan yang kokoh dan tahan lama, serta mudah dalam perawatan;

3. penyediaan koefisien dasar hijau minimal sebesar 40% (empat puluh persen) persen;
4. penyediaan fasilitas atau peralatan darurat seperti hidran kebakaran;
5. jarak bebas ketinggian antara atap bangunan dengan titik tengah Menara meliputi:
    a) lapangan terbuka atau Daerah terbuka minimal 8,5 (delapan koma lima) meter;
    b) bangunan dan jembatan minimal 5 (lima) meter;
    c) tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan minimal 5 (lima) meter;
    d) jalan/jalan raya/rel kereta api minimal 9 (sembilan) meter;
    e) lapangan umum minimal 13,5 (tiga belas koma lima) meter; dan
    f) SUTT lain, SUTR, SUTM, saluran udara telekomunikasi, antena, dan kereta gantung maksimal 4 (empat) meter.

(3) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sempadan sungai meliputi:

a. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
b. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
        a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
        b) SWP I.B pada Blok I.B.2.
    2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan

d. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

(4) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sempadan ketenagalistrikan meliputi:

a. Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.A pada Blok 1.A.2 dan Blok 1.A.3; dan

2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.A pada Blok 1.A.3.

b. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan

c. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 49

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f meliputi:

a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;

b. ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif; dan

c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ.

Pasal 50

Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.

Pasal 51

(1) Ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b merupakan ketentuan pemberian Insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang, memiliki nilai tambah pada Zona yang perlu didorong, dan memberikan dampak positif bagi Masyarakat, serta pemberian Disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang, dan memberikan dampak negatif bagi Masyarakat.

(2) Ketentuan pelaksanaan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:

    a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;

    b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan

    c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.

(3) Insentif dan Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Insentif dan Disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan kepada Masyarakat.

(5) Insentif kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:

    a. pemberian kompensasi;

    b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;

    c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau

d. penghargaan.

(6) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:

a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;

b. pemberian kompensasi;

c. subsidi;

d. imbalan;

e. sewa ruang;

f. urun saham;

g. penyediaan prasarana dan sarana;

h. fasilitasi persetujuan KKPR;

i. penghargaan; dan/atau

j. publikasi atau promosi.

(7) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(8) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;

b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau

c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, besaran, lokasi, dan tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Ketentuan untuk penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur yang benar.

Pasal 53

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 terdapat di:

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan

b. Zona badan air dengan kode BA.

(2) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ketentuan yang berlaku bagi kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah terbangun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan berada pada Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS meliputi:

a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. kegiatan terbatas dan kegiatan bersyarat dilakukan pembatasan dan pelaksanaan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. kegiatan penimbunan atau melakukan urugan pada bagian tepi badan air dibatasi hanya untuk pembangunan tanggul sungai, prasarana sarana sumber daya air dan kegiatan lainnya yang telah mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis yang membidangi.

b. ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif meliputi:

1. kegiatan yang diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat yang mendukung konservasi sungai dan fungsi perlindungan setempat berhak mendapatkan Insentif; dan

2. kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang dikenakan Disinsentif.

c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ meliputi:

1. kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang yang memiliki risiko dan dampak negatif besar atau tinggi ditetapkan untuk dilakukan penertiban dan pengembalian fungsi ruang;

2. menyediakan akses publik menuju sempadan sungai;

3. melakukan proteksi dan adaptasi terhadap resiko bencana banjir atau longsor dengan membuat struktur alami atau struktur buatan untuk mitigasi; dan

4. kegiatan dan penggunaan yang tidak sesuai dapat disesuaikan dengan ketentuan dialihkan keluar dari zona perlindungan setempat sesuai kavling bidang tanah yang dikuasai dan telah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari dinas teknis.

(3) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan penggunaan lahan yang sudah terlanjur terbangun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan berada pada Sub-Zona badan air dengan kode BA meliputi:

a. untuk melindungi penggunaan badan air dari konversi penggunaan lahan, dimana pemilik lahan di badan air yang memiliki alas hak sebelum penetapan Peraturan Bupati ini dapat memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku;

b. pemanfaatan ruang pada badan air untuk kepentingan sumber air baku diatur sesuai ketentuan yang berlaku;

c. pada areal kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan hanya diizinkan melakukan aktivitas tambang maksimal 40 (empat puluh) persen dari luas areal izin usaha pertambangan;

d. pada areal izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf c menetapkan jarak aman dari tepi sungai sesuai dengan kajian teknis yang membidangi;

e. pelaku usaha tambang yang memiliki izin usaha pertambangan wajib melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

f. pemanfaatannya diarahkan sebagai ruang untuk kawasan lindung berupa perlindungan setempat dan/atau Ruang Terbuka Biru (RTB); dan

g. dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk budi daya perikanan, fasilitas rekreasi, ruang terbuka publik, serta sarana pendidikan dan penelitian tentang sungai dengan batasan luas terbangun 10% (sepuluh persen) dari luas area pemanfaatan serta konstruksi bangunan tahan banjir dan menyediakan jalur, rambu, dan ruang evakuasi banjir.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 54

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.

(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

(3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

(1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Tobadak adalah

20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

(2) 1 (satu) tahun sebelum dilakukan peninjauan kembali, dilakukan penilaian perwujudan RDTR.

(3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dan peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Tobadak dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

(4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan perundang-undangan;

c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan perundang-undangan; atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Penilaian Perwujudan dan peninjauan kembali Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang RDTR Kawasan Perkotaan Tobadak dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

(6) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterbitkan dengan kriteria:

a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

(7) Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang RDTR Kawasan Perkotaan Tobadak dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Mamuju Tengah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan

c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI MAMUJU TENGAH,

H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

H. ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 26

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK

TAHUN 2023-2042

I. UMUM

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, perlu ditata agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Penataan ruang yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat yang dituangkan dalam peraturan daerah dan peraturan pelaksana lainnya, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

RDTR dan Peraturan Zonasi sebagai perangkat operasionalisasi kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Mamuju Tengah. Rencana Zonasi merupakan acuan lebih detil pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

RDTR Kawasan Perkotaan Tobadak merupakan rencana yang menetapkan blok pada Kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antarkegiatan dalam Kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam Kawasan fungsional tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas dan sejalan dengan amanat Peraturan Perundang-undangan, maka perlu untuk mengadakan RDTR Kawasan Perkotaan Tobadak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35 Cukup jelas

Pasal 36 Cukup jelas

Pasal 37 Cukup jelas

Pasal 38 Cukup jelas

Pasal 39 Cukup jelas

Pasal 40 Cukup jelas

Pasal 41 Cukup jelas

Pasal 42 Cukup jelas

Pasal 43 Cukup jelas

Pasal 44 Cukup jelas

Pasal 45 Cukup jelas

Pasal 46 Cukup jelas

Pasal 47 Cukup jelas

Pasal 48 Cukup jelas

Pasal 49 Cukup jelas

Pasal 50 Cukup jelas

Pasal 51 Cukup jelas

Pasal 52 Cukup jelas

Pasal 53 Cukup jelas

Pasal 54 Cukup jelas

Pasal 55 Cukup jelas

Pasal 56 Cukup jelas

Pasal 57 Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR 1

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK
TAHUN 2023-2042

PETA WILAYAH PERENCANAAN

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

BATAS ADMINISTRASI WILAYAH

Administrasi Kecamatan
- Kecamatan Budong-Budong
- Kecamatan Tobadak
- Kecamatan Topoyo

Desa Waeputeh
Desa Kabubu
Desa Paraili
Kecamatan Topoyo
Desa Topoyo
Desa Paraili
Kabupaten Mamuju Tengah
Desa Pangalloang
Desa Tobadak
Kecamatan Tobadak
Desa Babana
Kecamatan Budong-Budong

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2021

Mengetahui,
BUPATI MAMUJU TENGAH

Hj. Aras Tammauni

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK
TAHUN 2023-2042

PETA PEMBAGIAN SUB WP DAN BLOK

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

BATAS ADMINISTRASI WILAYAH

Sub Wilayah Perencanaan
- I.A
- I.B
- I.C

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View - 3 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah dikoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2021

Mengetahui,
BUPATI MAMUJU TENGAH

Hi. Aras Tammauni

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK
TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kecamatan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Rencana Jaringan Transportasi

Jaringan Transportasi Darat
- Jembatan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder

Rencana Jaringan Telekomunikasi
- Kotak Pembagi
- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Sentral Telepon Otomat (STO)
- Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)
- Jaringan Serat Optik

Rencana Jaringan Energi
- Gardu Distribusi
- Gardu Hubung
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)

Rencana Jaringan Sumber Daya Air
- Jaringan Pengendalian Banjir

Rencana Jaringan Air Minum
- Bangunan Pengambil Air Baku
- Instalasi Produksi
- Jaringan Transmisi Air Baku
- Jaringan Distribusi Pembagi

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Rencana Jaringan Persampahan
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)

Rencana Jaringan Drainase
- Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2023

Mengetahui,
BUPATI MAMUJU TENGAH

H. Aras Tammauni

750005 119°15'0" 753005 119°16'30" 758005mT 119°18'0"E

9773995 2°3'0" 9770995 2°4'30" 9767995mU

Desa Waeputeh
I.C.2
Desa Kabubu
I.C.2
I.C.1
I.C.2
Desa Paraili
I.C.2
Kecamatan Topoyo
I.C.1
Desa Topoyo
I.B.2
Desa Paraili
I.B.1
I.B.1
Kabupaten Mamuju Tengah
I.B.1
Desa Pangalloang
I.B.2
I.A.3
Desa Tobadak
I.A.2
Desa Babana
I.A.1
I.A.1
I.A.1
Kecamatan Tobadak
Kecamatan Budong-Budong

750005mT 119°15'0"E 753005 119°16'30" 758005 119°18'0"E

9773995mU 2°3'0"LS 9770995 2°4'30" 9767995

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

LAMPIRAN III.A
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK
TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

U
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

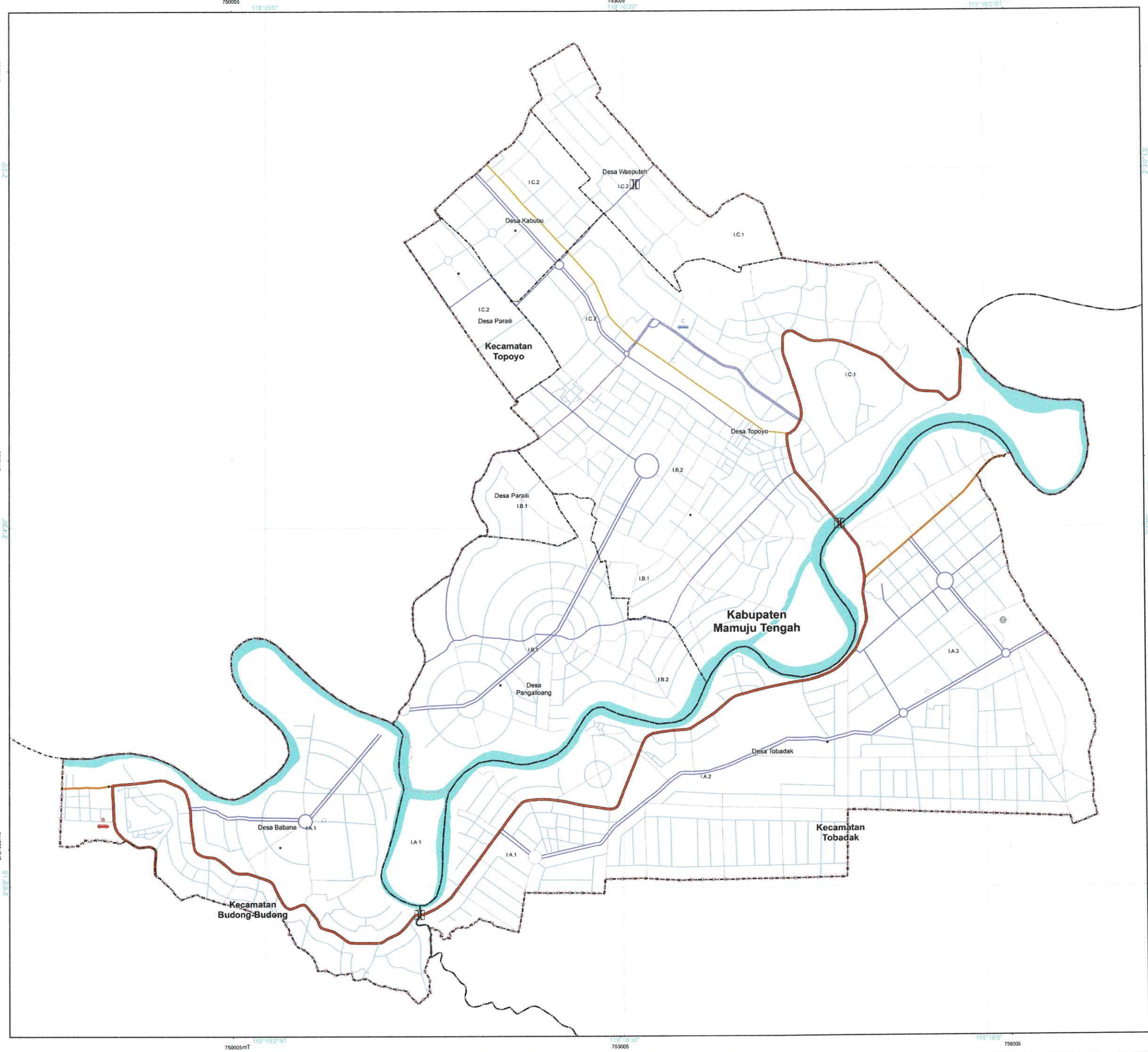
RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- C Pusat Lingkungan Kecamatan
- L Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) WorldView- 3 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2021

Mengetahui,
BUPATI MAMUJU TENGAH

H. Arras Tammauni



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

LAMPIRAN III.B
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK
TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rancana Jaringan Transportasi

Jaringan Transportasi Darat
- Jembatan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Penggunaan data tahun 2021

Mengetahui,
BUPATI MAMUJU TENGAH

H. Aras Tammauni

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

LAMPIRAN III.C
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK
TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Energi
- Gardu Distribusi
- Gardu Hubung
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengolahan data tahun 2021

Mengetahui,
BUPATI MAMUJU TENGAH

H. Aras Tammauni

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

LAMPIRAN III.D
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK
TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Telekomunikasi
- Kotak Pembagi
- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Sentral Telepon Otomat (STO)
- Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)
- Jaringan Serat Optik

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2021

Mengetahui
BUPATI MAMUJU TENGAH

H. Aras Tammauni

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

LAMPIRAN III.E
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK
TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

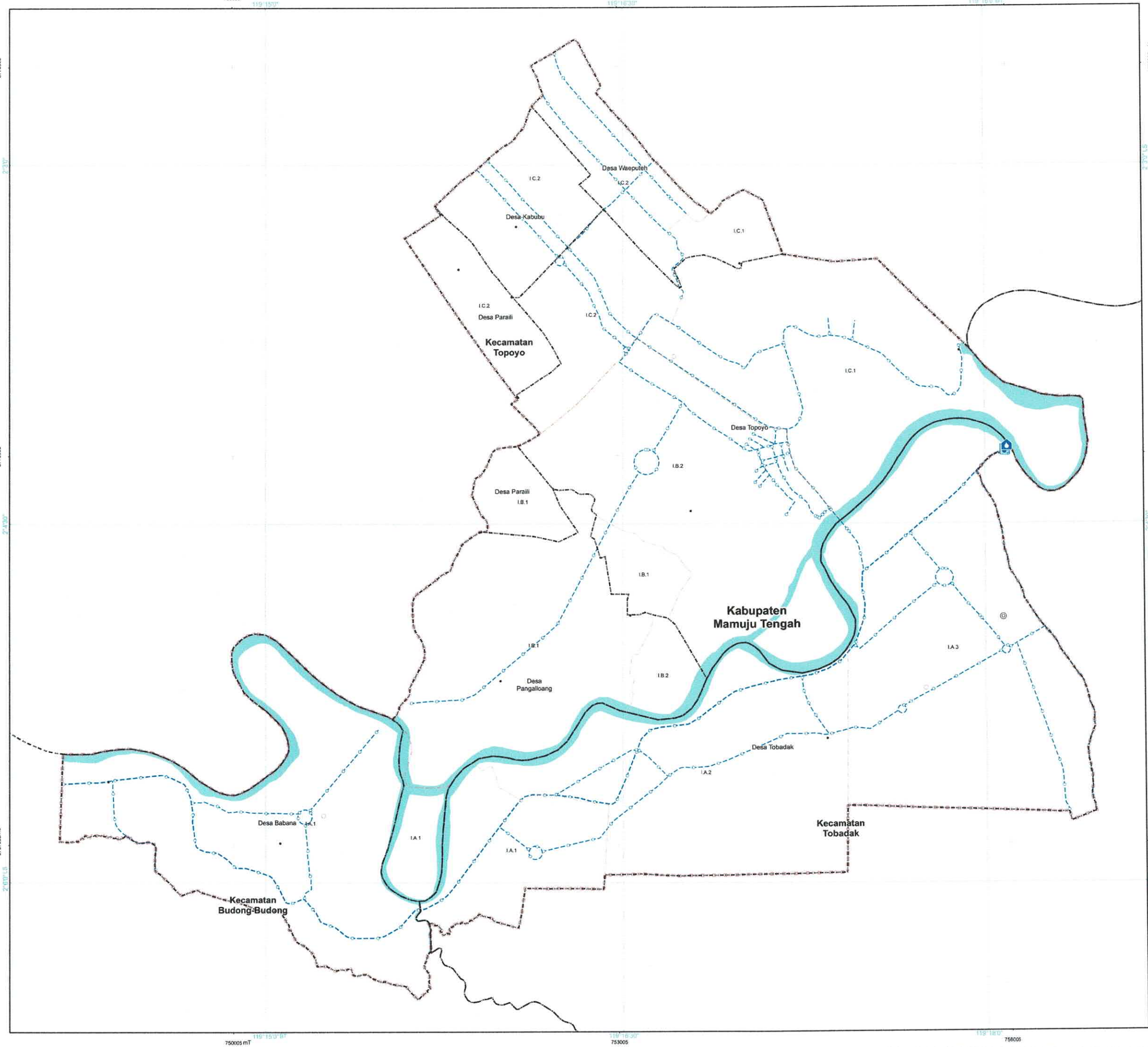
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
- Jaringan Pengendalian Banjir

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoleksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2021

Mengetahui,
BUPATI MAMUJU TENGAH

Ir. Aras Tammauni

Desa Waeputeh
Desa Kabubu
Desa Paraili
Kecamatan Topoyo
Desa Topoyo
Desa Paraili
Kabupaten Mamuju Tengah
Desa Pangalloang
Desa Tobadak
Desa Babana
Kecamatan Tobadak
Kecamatan Budong-Budong



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

LAMPIRAN III.F
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK
TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Air Minum
- Bangunan Pengambil Air Baku
- Instalasi Produksi
- Jaringan Transmisi Air Baku
- Jaringan Distribusi Pembagi

SUMBER DATA DAN RUJUKAN PETA :
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Penggunaan data tahun 2021

Mengetahui,
BUPATI MAMUJU TENGAH

M. Ras Tammauni

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

LAMPIRAN III.G
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK
TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

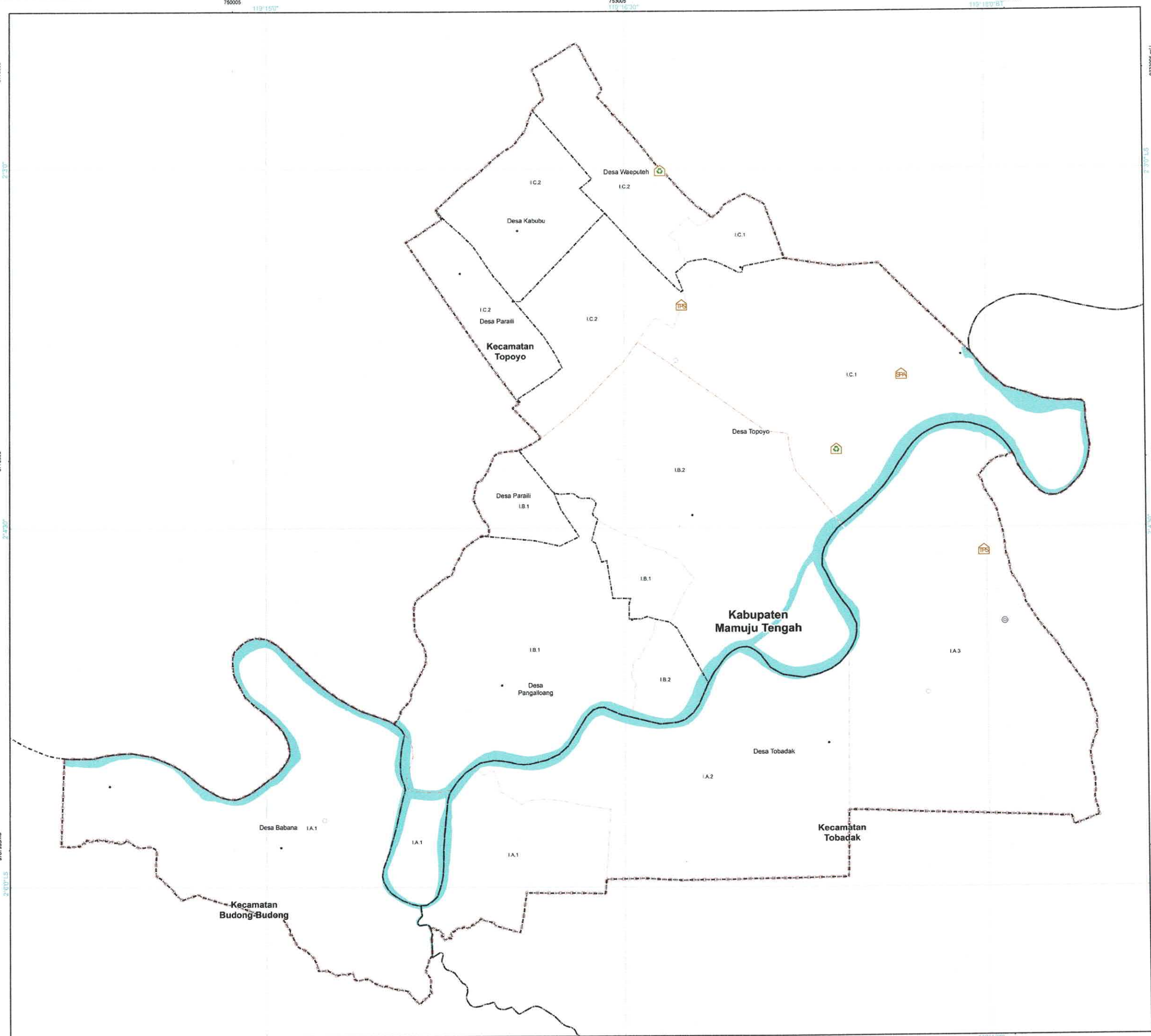
RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah dikoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2021

Mengetahui,
BUPATI MAMUJU TENGAH

H. Aras Tammauni



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

LAMPIRAN III.H
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK
TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Persampahan
- SPA Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- TPS Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2021

Mengetahui
BUPATI MAMUJU TENGAH

Habsi Tammauni

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

LAMPIRAN III.I
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK
TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Drainase
- Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

SUMBER DATA DAN RUJUKAN PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2022

Mengetahui,
BUPATI MAMUJU TENGAH

H. Aras Tammauni

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

LAMPIRAN III.J
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK
TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2023

Mengetahui
BUPATI MAMUJU TENGAH

H. Aras Tammauni

Desa Waeputeh
Desa Kabubu
Desa Paraili
Kecamatan Topoyo
Desa Topoyo
Desa Paraili
Desa Pangalloang
Kabupaten Mamuju Tengah
Desa Tobadak
Kecamatan Tobadak
Desa Babana
Kecamatan Budong-Budong
I.C.1
I.C.2
I.A.1
I.A.2
I.A.3
I.B.1
I.B.2

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK
TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA POLA RUANG

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Badan Jalan
- Badan Jalan

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Badan Air
- BA Badan Air

Zona Perlindungan Setempat
- PS Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-1 Rimba Kota
- RTH-2 Taman Kota
- RTH-4 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman
- RTH-8 Jalur Hijau

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian
- P-3 Perkebunan

Zona Perumahan
- R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Campuran
- C-2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang

Zona Pengelolaan Persampahan
- PP Pengelolaan Persampahan

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP

Zona Transportasi
- TR Transportasi

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2021
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8625/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2020
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.50/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2023 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Pada Kelompok Hutan Sungai Lumu, Kelompok Hutan Gunung Kapal, Dan Kelompok Hutan Budong-Budong Seluas 29.999.465 M2 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima) Hektar, Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Kelompok Masyarakat Di Desa Batupanigi, Desa Kamboong, Desa Salulebo, Desa Sibatta, Desa Tasokko, Dan Desa Tumbu Pada Kecamatan Karossa, Kecamatan Pangale, Kecamatan Tobadak, Dan Kecamatan Topoyo Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria Di Kabupaten Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat

Mengetahui,
BUPATI MAMUJU TENGAH

Arae Nammauni

Kecamatan Topoyo
Kecamatan Budong-Budong
Kecamatan Tobadak
Desa Waeputeh
Desa Kabubu
Desa Paraili
Desa Pangaloang
Desa Babana
Desa Topoyo
Desa Tobadak

9773995 mU
9770995
9767995
750005 mT
753005
756005 mT
119°15'0"E
119°16'30"E
119°18'0"E
2°4'30"S
2°6'0"S

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK TAHUN 2023-2042

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS
RDTR KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
I	**PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG**															
A	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan															
a	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan															
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
1.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	SWP I.A pada Blok I.A.3	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta									
2	Program Pengembangan Permukiman															
2.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten															
2.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten	SWP I.A pada Blok I.A.3	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta									
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
3.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten															
3.1.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten	SWP I.A pada Blok I.A.3	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-									
3.1.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten (Pengembangan Ruang Dan Pejalan Kaki Untuk	SWP I.A pada Blok I.A.3	APBD Kabupaten	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perhubungan	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan PPK)															
3.1.3	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten (Pengembangan Jalur Sepeda Baru)	SWP I.A pada Blok I.A.3	APBD Kabupaten	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perhubungan	-									
b	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan															
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
1.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	- Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Babana terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 - Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Tobadak terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 - Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Topoyo terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 - Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Waeputeh terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta									
2	Program Pengembangan Permukiman															
2.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten															
2.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten	- Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Babana terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 - Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Tobadak terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 - Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Topoyo terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 - Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Waeputeh terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta									
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
3.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi															
3.1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (Pengembangan Ruang Dan Pejalan Kaki Untuk Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan SPPK)	Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Babana terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1	APBD Provinsi	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perhubungan	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perhubungan	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
3.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota															
3.2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten (Pengembangan Ruang Dan Pejalan Kaki Untuk Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan SPPK)	- Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Babana terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 - Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Tobadak terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 - Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Topoyo terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 - Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Waeputeh terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perhubungan	-									
c	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (Pusat Lingkungan Kecamatan)															
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
1.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pusat Lingkungan Kecamatan Topoyo terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta									
2	Program Pengembangan Permukiman															
2.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten															
2.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten	Pusat Lingkungan Kecamatan Topoyo terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta									
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
3.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota															
3.1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten (Pengembangan Ruang Dan Pejalan Kaki Untuk Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan PL)	Pusat Lingkungan Kecamatan Topoyo terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	- Perhubungan - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
d	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa)															
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
1.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	- Pusat Lingkungan Desa Babana terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 - Pusat Lingkungan Desa Tobadak terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 - Pusat Lingkungan Desa Pangalloang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 - Pusat Lingkungan Desa Topoyo terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta									
2	Program Pengembangan Permukiman															
2.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten															
2.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten	- Pusat Lingkungan Desa Babana terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 - Pusat Lingkungan Desa Tobadak terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 - Pusat Lingkungan Desa Pangalloang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 - Pusat Lingkungan Desa Topoyo terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta									
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
3.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi															
3.1.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi (Halte Angkutan Umum)	Pusat Lingkungan Desa Babana terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1	APBD Provinsi	-	Perhubungan	Perhubungan	-									
3.1.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (Pengembangan Ruang Dan Pejalan Kaki Untuk Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan PL)	Pusat Lingkungan Desa Babana terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1	APBD Provinsi	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perhubungan	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perhubungan	-									
3.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota															
3.2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten (Pengembangan Ruang Dan Pejalan Kaki Untuk Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan PL)	- Pusat Lingkungan Desa Babana terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 - Pusat Lingkungan Desa Tobadak terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 - Pusat Lingkungan Desa Pangalloang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 - Pusat Lingkungan Desa Topoyo terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perhubungan	-									
B	Rencana Jaringan Transportasi															
a	Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
1	Program Penyelenggaraan Jalan															
1.1	Penyelenggaraan Jalan Nasional (Jaringan Jalan Arteri Primer)															
1.1.1	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	- Karossa – Topoyo melintas di SWP I.C - Topoyo - Tarailu melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBN	- Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Pelaksanaan Jalan Nasional	-	-	-									
1.1.2	Rekonstruksi Jalan (Peningkatan Perkerasan Jalan)	- Karossa – Topoyo melintas di SWP I.C - Topoyo - Tarailu melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBN	- Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Pelaksanaan Jalan Nasional	-	-	-									
1.1.3	Pemeliharaan Jalan Secara Berkala	- Karossa – Topoyo melintas di SWP I.C - Topoyo - Tarailu melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBN	- Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Pelaksanaan Jalan Nasional	-	-	-									
1.1.4	Pemeliharaan Jalan Secara Rutin	- Karossa – Topoyo melintas di SWP I.C - Topoyo - Tarailu melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBN	- Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Pelaksanaan Jalan Nasional	-	-	-									
1.2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi (Jaringan Jalan Kolektor Primer)															
1.2.1	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Akses Pelabuhan Budong-Budong (Polohu-Babana-Pelabuhan) melintas di SWP I.A	APBD Provinsi	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-									
1.2.2	Rekonstruksi Jalan (Peningkatan Perkerasan Jalan)	Akses Pelabuhan Budong-Budong (Polohu-Babana-Pelabuhan) melintas di SWP I.A	APBD Provinsi	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-									
1.2.3	Pemeliharaan Jalan Secara Berkala	Akses Pelabuhan Budong-Budong (Polohu-Babana-Pelabuhan) melintas di SWP I.A	APBD Provinsi	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-									
1.2.4	Pemeliharaan Jalan Secara Rutin	Akses Pelabuhan Budong-Budong (Polohu-Babana-Pelabuhan) melintas di SWP I.A	APBD Provinsi	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-									
1.3	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jaringan Jalan Kolektor Primer)															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
1.3.1	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Jalan Nasional - Mahahe melintas di SWP I.A	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.3.2	Rekonstruksi Jalan (Peningkatan Perkerasan Jalan)	Jalan Nasional - Mahahe melintas di SWP I.A	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.3.3	Pemeliharaan Jalan Secara Berkala	Jalan Nasional - Mahahe melintas di SWP I.A	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.3.4	Pemeliharaan Jalan Secara Rutin	Jalan Nasional - Mahahe melintas di SWP I.A	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.4	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jaringan Jalan Kolektor Sekunder)															
1.4.1	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Topoyo - Tumbu melintas di SWP I.B dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.4.2	Rekonstruksi Jalan (Peningkatan Perkerasan Jalan)	Topoyo - Tumbu melintas di SWP I.B dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.4.3	Pemeliharaan Jalan Secara Berkala	Topoyo - Tumbu melintas di SWP I.B dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.4.4	Pemeliharaan Jalan Secara Rutin	Topoyo - Tumbu melintas di SWP I.B dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.5	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jaringan Jalan Lokal Primer)															
1.5.1	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	- Jalan Nasional-Pangalloang-Patulana melintas di SWP I.B - Dalam KTM Tobadak melintas di SWP I.A - Jalan Pasar Baru melintas di SWP I.C - Paraili - Kabubu melintas di SWP I.C - Sekoci - Paraili melintas di SWP I.B dan SWP 1.C - Waeputeh - Bayor melintas di SWP I.B dan SWP 1.C - Waeputeh - Tappilina melintas di SWP I.C - jalan lokal primer lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.5.2	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	jalan lokal primer lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
1.5.3	Pembangunan Jalan	jalan lokal primer lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.5.4	Rekonstruksi Jalan (Peningkatan Perkerasan Jalan)	- Jalan Nasional-Pangalloang-Patulana melintas di SWP I.B - Dalam KTM Tobadak melintas di SWP I.A - Jalan Pasar Baru melintas di SWP I.C - Paraili - Kabubu melintas di SWP I.C - Sekoci - Paraili melintas di SWP I.B dan SWP 1.C - Waeputeh - Bayor melintas di SWP I.B dan SWP 1.C - Waeputeh - Tappilina melintas di SWP I.C - jalan lokal primer lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.5.5	Pemeliharaan Jalan Secara Berkala	- Jalan Nasional-Pangalloang-Patulana melintas di SWP I.B - Dalam KTM Tobadak melintas di SWP I.A - Jalan Pasar Baru melintas di SWP I.C - Paraili - Kabubu melintas di SWP I.C - Sekoci - Paraili melintas di SWP I.B dan SWP 1.C - Waeputeh - Bayor melintas di SWP I.B dan SWP 1.C - Waeputeh - Tappilina melintas di SWP I.C - jalan lokal primer lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.5.6	Pemeliharaan Jalan Secara Rutin	- Jalan Nasional-Pangalloang-Patulana melintas di SWP I.B - Dalam KTM Tobadak melintas di SWP I.A - Jalan Pasar Baru melintas di SWP I.C - Paraili - Kabubu melintas di SWP I.C - Sekoci - Paraili melintas di SWP I.B dan SWP 1.C - Waeputeh - Bayor melintas di SWP I.B dan SWP 1.C - Waeputeh - Tappilina melintas di SWP I.C - jalan lokal primer lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
1.6	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jaringan Jalan Lokal Sekunder)															
1.6.1	Pelebaran Jalan Menuju Standar	- Dalam Kota Topoyo melintas di SWP I.B - Dalam KTM Tobadak melintas di SWP I.A - Jalan Nasional - Lembah Deko melintas di SWP I.C - Jalan Nasional - Penghubung Pasar Baru melintas di SWP I.C - Jalan Penghubung Akses Pasar Baru melintas di SWP I.C - Jalan Penghubung Dusun Ngapaboa melintas di SWP 1.C - Pasar Baru - Waeputeh melintas di SWP 1.C - Pasar Lama - Paraili melintas di SWP I.B dan SWP 1.C - jalan lokal sekunder lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.6.2	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	jalan lokal sekunder lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.6.3	Pembangunan Jalan	jalan lokal sekunder lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.6.4	Rekonstruksi Jalan (Peningkatan Perkerasan Jalan)	- Dalam Kota Topoyo melintas di SWP I.B - Dalam KTM Tobadak melintas di SWP I.A - Jalan Nasional - Lembah Deko melintas di SWP I.C - Jalan Nasional - Penghubung Pasar Baru melintas di SWP I.C - Jalan Penghubung Akses Pasar Baru melintas di SWP I.C - Jalan Penghubung Dusun Ngapaboa melintas di SWP 1.C - Pasar Baru - Waeputeh melintas di SWP 1.C - Pasar Lama - Paraili melintas di SWP I.B dan SWP 1.C - jalan lokal sekunder lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.6.5	Pemeliharaan Jalan Secara Berkala	- Dalam Kota Topoyo melintas di SWP I.B - Dalam KTM Tobadak melintas di SWP I.A	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
		- Jalan Nasional - Lembah Deko melintas di SWP I.C - Jalan Nasional - Penghubung Pasar Baru melintas di SWP I.C - Jalan Penghubung Akses Pasar Baru melintas di SWP I.C - Jalan Penghubung Dusun Ngapaboa melintas di SWP 1.C - Pasar Baru - Waeputeh melintas di SWP 1.C - Pasar Lama - Paraili melintas di SWP I.B dan SWP 1.C - jalan lokal sekunder lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C														
1.6.6	Pemeliharaan Jalan Secara Rutin	- Dalam Kota Topoyo melintas di SWP I.B - Dalam KTM Tobadak melintas di SWP I.A - Jalan Nasional - Lembah Deko melintas di SWP I.C - Jalan Nasional - Penghubung Pasar Baru melintas di SWP I.C - Jalan Penghubung Akses Pasar Baru melintas di SWP I.C - Jalan Penghubung Dusun Ngapaboa melintas di SWP 1.C - Pasar Baru - Waeputeh melintas di SWP 1.C - Pasar Lama - Paraili melintas di SWP I.B dan SWP 1.C - jalan lokal sekunder lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.7	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jaringan Jalan Lingkungan Sekunder)															
1.7.1	Pelebaran Jalan Menuju Standar	- Benteng – Kondosapata melintas di SWP I.A - Jalan Dusun Benteng melintas di SWP I.A - Topoyo - Tobadak melintas di SWP I.A - Waeputeh - Salupangkang IV melintas di SWP I.C - jalan lingkungan sekunder lainnya melintas di di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.7.2	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	jalan lingkungan sekunder lainnya melintas di di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
1.7.3	Pembangunan Jalan	jalan lingkungan sekunder lainnya melintas di di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.7.4	Rekonstruksi Jalan (Peningkatan Perkerasan Jalan)	- Benteng – Kondosapata melintas di SWP I.A - Jalan Dusun Benteng melintas di SWP I.A - Topoyo - Tobadak melintas di SWP I.A - Waeputeh - Salupangkang IV melintas di SWP I.C - jalan lingkungan sekunder lainnya melintas di di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.7.5	Pemeliharaan Jalan Secara Berkala	- Benteng – Kondosapata melintas di SWP I.A - Jalan Dusun Benteng melintas di SWP I.A - Topoyo - Tobadak melintas di SWP I.A - Waeputeh - Salupangkang IV melintas di SWP I.C - jalan lingkungan sekunder lainnya melintas di di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.7.6	Pemeliharaan Jalan Secara Rutin	- Benteng – Kondosapata melintas di SWP I.A - Jalan Dusun Benteng melintas di SWP I.A - Topoyo - Tobadak melintas di SWP I.A - Waeputeh - Salupangkang IV melintas di SWP I.C - jalan lingkungan sekunder lainnya melintas di di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.8	Penyelenggaraan Jalan Nasional (Jalan Tol)															
1.8.1	Kajian Pembangunan Jalan Tol	Jalan Tol Mamuju-Palu	APBN	- Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Pengatur Jalan Tol	-	-	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
1.8.2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jalan Tol Mamuju-Palu	- APBN - APBD Kabupaten	- Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Pengatur Jalan Tol	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.8.3	Pembangunan Jalan Tol	Jalan Tol Mamuju-Palu	APBN	- Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Pengatur Jalan Tol	-	-	-									
b	Perwujudan Terminal Penumpang															
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (Provinsi)															
1.1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Terminal Penumpang Tipe B Mamuju Tengah terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1	APBD Provinsi	-	Perhubungan	Perhubungan	-									
1.1.2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terminal Penumpang Tipe B Mamuju Tengah terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1	APBD Provinsi	-	Perhubungan	Perhubungan	-									
1.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terminal Penumpang Tipe B Mamuju Tengah terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1	APBD Provinsi	-	Perhubungan	Perhubungan	-									
1.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C (Kabupaten)															
1.2.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Terminal Penumpang Tipe C Topoyo terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-									
1.2.2	Pembangunan Gedung Terminal	Terminal Penumpang Tipe C Topoyo terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-									
1.2.3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terminal Penumpang Tipe C Topoyo terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-									
1.2.4	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terminal Penumpang Tipe C Topoyo terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-									
1.2.5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terminal Penumpang Tipe C Topoyo terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-									
c	Perwujudan Jembatan															
1	Program Penyelenggaraan Jalan															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
1.1	Penyelenggaraan Jalan															
1.1.1	Rehabilitasi Jembatan	Jembatan Budong-Budong terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan SWP I.C pada Blok I.C.1	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pelaksanaan Jalan Nasional	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.2	Rehabilitasi Jembatan	- Jembatan Sungai Bulurembu di SWP I.A pada Blok I.A.1 - Jembatan JB1 045 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2	- APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
C	Rencana Jaringan Energi															
a	Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem															
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan															
1.1	Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik															
1.1.1	Pengembangan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SUTT 150 kV PLTU Mamuju - Topoyo melintas di SWP I.A	APBN	- Energi dan Sumber Daya Mineral - PT. PLN/ BUMN	-	-	-									
b	Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik															
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan															
1.1	Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik															
1.1.1	Pengembangan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBN	Energi dan Sumber Daya Mineral PT. PLN/ BUMN	-	-	-									
c	Perwujudan Gardu Listrik															
1	Perwujudan Gardu Listrik															
1.1	Pembangunan dan Pengembangan Gardu Hubung															
1.1.1	Optimalisasi dan Pengembangan Gardu Hubung	- SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBN	Energi dan Sumber Daya Mineral PT. PLN/ BUMN	-	-	-									
1.1.2	Pembangunan Gardu Distribusi Untuk Menunjang Pengembangan Perkotaan Tobadak	- SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	APBN	Energi dan Sumber Daya Mineral PT. PLN/ BUMN	-	-	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
1.2	Pembangunan dan Pengembangan Gardu Distribusi															
1.1.1	Optimalisasi dan Pengembangan Gardu Distribusi	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBN	Energi dan Sumber Daya Mineral PT. PLN/ BUMN	-	-	-									
1.2.2	Pembangunan Gardu Distribusi Untuk Menunjang Pengembangan Perkotaan Tobadak	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBN	Energi dan Sumber Daya Mineral PT. PLN/ BUMN	-	-	-									
D	Rencana Jaringan Telekomunikasi															
a	Perwujudan Jaringan Tetap															
1	Program Penyelenggaraan Jaringan Tetap															
1.1	Rencana Pengembangan Jaringan Tetap															
1.1.1	Pengembangan Jaringan Serat Optik	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBN	PT. Telkom/ BUMN	-	Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	-									
1.1.2	Pengembangan Sentral Telepon Otomat (STO)	SWP I.C pada Blok I.C.2	- APBN - Swasta	PT. Telkom/ BUMN	-	Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	Swasta									
1.1.3	Pengembangan Kotak Pembagi	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBN APBD Kabupaten Swasta	PT. Telkom/ BUMN	-	Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	Swasta									
1.1.4	Pengembangan Kamera Pengawas "CCTV" dan Peningkatan Pelayanan Ruang Pengendali Informasi	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	Swasta									
b	Perwujudan Jaringan Terestrial															
1	Program Penyelenggaraan Jaringan Terestrial															
1.1	Rencana Pengembangan Jaringan Terestrial															
1.1.1	Pengembangan Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)	SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kabupaten Swasta	-	-	Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	Swasta									
c	Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler															
1	Program Perwujudan Bangunan Menara Perambuan															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi															
1.1.1	Pengembangan Menara *Base Transceiver Station* (BTS)	- SWP I.A pada Blok I.A.2 - SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian	Swasta									
2	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi															
2.1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi															
2.1.1	Pengendalian dan Pengaturan Menara *Base Transceiver Station* (BTS)	- SWP I.A pada Blok I.A.2 - SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
E	Rencana Jaringan Sumber Daya Air															
a	Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir															
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)															
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten															
1.1.1	Pembangunan Jaringan Pengendalian Banjir (Pembangunan Tanggul Sungai)	SWP I.A SWP I.B SWP I.C	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.2	Rehabilitasi Jaringan Pengendalian Banjir (Perbaikan Tanggul Mencegah *Backwater* Dari Sungai)	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.3	Peningkatan Jaringan Pengendalian Banjir (Pemasangan Pengaman Tepi Sungai)	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.4	Peningkatan Jaringan Pengendalian Banjir (Pemasangan Pengaman Tepi Sungai pada Sungai Kecil Lainnya)	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pengendalian Banjir (Peningkatan Saluran Primer Dan Pintu Air Otomatis (Pasang Surut) Untuk Saluran Tersebut)	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.6	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pengendalian Banjir	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBN	Pekerjaan Umum dan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
	(Normalisasi/Pengerukan Sungai)			Perumahan Rakyat												
1.1.7	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pengendalian Banjir (Pembuatan Patok BM Elevasi)	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
F	Rencana Jaringan Air Minum															
a	Perwujudan Jaringan Perpipaan (Unit Air Baku)															
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Peningkatan Bangunan Pengambil Air Baku (Intake IKK KTM Tobadak)	SWP I.A pada Blok I.A.3	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	UPTD									
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengambil Air Baku (Intake IKK KTM Tobadak)	SWP I.A pada Blok I.A.3	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	UPTD									
1.1.3	Peningkatan Bangunan Jaringan Transmisi Air Baku	SWP I.A	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	UPTD									
1.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Transmisi Air Baku	SWP I.A	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	UPTD									
b	Perwujudan Jaringan Perpipaan (Unit Produksi)															
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan (Pengembangan Jaringan Kawasan Yang Belum Terlayani)	Kawasan Perkotaan Tobadak	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	UPTD									
1.1.2	Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan	Kawasan Perkotaan Tobadak	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	UPTD									
1.1.3	Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan	Kawasan Perkotaan Tobadak	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	UPTD									
1.1.4	Peningkatan Instalasi Produksi (IPA KTM Tobadak)	SWP I.A pada Blok I.A.3	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	UPTD									
1.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Produksi (IPA KTM Tobadak)	SWP I.A pada Blok I.A.3	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	UPTD									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
c	Perwujudan Jaringan Perpipaan (Unit Distribusi)															
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Peningkatan Jaringan Distribusi Pembagi	SWP I.A SWP I.B SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	UPTD									
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Pembagi	SWP I.A SWP I.B SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	UPTD									
G	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)															
a	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik (Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik)															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten															
1.1.1	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik di RSUD Kabupaten Mamuju Tengah	SWP I.A pada Blok I.A.3	APBD Kabupaten	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Kesehatan - Lingkungan Hidup	-									
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan IPAL Non Domestik di RSUD Kabupaten Mamuju Tengah	SWP I.A pada Blok I.A.3	APBD Kabupaten	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Kesehatan - Lingkungan Hidup	-									
1.1.3	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik di Puskesmas Topoyo	SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Kesehatan - Lingkungan Hidup	-									
1.1.4	Operasi dan Pemeliharaan IPAL Non Domestik di Puskesmas Topoyo	SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Kesehatan - Lingkungan Hidup	-									
b	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Subsistem Pengolahan Terpusat)															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
1.1.1	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	- SWP I.B Blok I.B.2 - SWP I.C Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	- SWP I.B Blok I.B.2 - SWP I.C Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-									
c	Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten															
1.1.1	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) di RSUD Kabupaten Mamuju Tengah	- SWP I.A pada Blok I.A.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kesehatan Lingkungan Hidup	-									
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) di RSUD Kabupaten Mamuju Tengah	- SWP I.A pada Blok I.A.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Kesehatan - lingkungan Hidup	-									
H	Rencana Jaringan Persampahan															
a	Perwujudan Stasiun Peralihan Antara (SPA)															
1	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional															
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten															
1.1.1	Pengadaan Stasiun Peralihan Antara	SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kabupaten Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lingkungan Hidup	Swasta									
b	Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R)															
1	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional															
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten															
1.1.1	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R), atau Sesuai Perkembangan	SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
	Teknologi Pengolahan Sampah)															
1.1.2	Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan (Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat)	SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	Lingkungan Hidup	- Swasta - Masyarakat									
c	Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS)															
1	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional															
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten															
1.1.1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (Pembangunan TPS Sesuai Jangkauan dan Radius Pelayanan Skala Kawasan/ Lingkungan Untuk Melayani Pusat - Pusat Pelayanan)	- SWP I.A pada Blok I.A.3 - SWP I.C pada Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									
1.1.2	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (Pengembangan Tempat Penampungan Sementara atau Sesuai Perkembangan Teknologi Pengolahan Sampah)	- SWP I.A pada Blok I.A.3 - SWP I.C pada Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									
1.1.3	Penyediaan Sarana Persampahan berupa Truk Sampah	- SWP I.A pada Blok I.A.3 - SWP I.C pada Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									
1.1.4	Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan (Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat)	- SWP I.A pada Blok I.A.3 - SWP I.C pada Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	Lingkungan Hidup	Swasta Masyarakat									
I	Rencana Jaringan Drainase															
a	Perwujudan Jaringan Drainase															
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten															
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (Pembuatan DED Saluran Drainase)	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
b	Perwujudan Jaringan Drainase Primer															
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten															
1.1.1	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan (Pembangunan Saluran Drainase Primer Di Daerah Prioritas Penanganan Luapan Sungai)	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.2	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan (Peningkatan Saluran Drainase Primer Yang Terintegrasi Dengan Pedestrian Termasuk Pembangunan Tanggul Dan Siring Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten)	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Pembersihan Saluran Drainase Dari Sedimen Dan Sampah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten)	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
c	Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder															
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten															
1.1.1	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan (Pembangunan Saluran Drainase Sekunder Di Daerah Prioritas Penanganan Luapan Sungai)	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.2	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan (Peningkatan Saluran Drainase Sekunder Yang Terintegrasi Dengan Pedestrian Termasuk Pembangunan Tanggul Dan Siring Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten)	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Pembersihan Saluran Drainase Dari Sedimen Dan	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
	Sampah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten)															
d	Perwujudan Jaringan Drainase Tersier															
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten															
1.1.1	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan (Pembangunan Saluran Drainase Tersier Di Daerah Prioritas Penanganan Luapan Sungai)	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.2	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan (Peningkatan Saluran Drainase Tersier Yang Terintegrasi Dengan Pedestrian Termasuk Pembangunan Tanggul Dan Siring Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten)	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Pembersihan Saluran Drainase Dari Sedimen Dan Sampah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten)	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
d	Perwujudan Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)															
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten															
1.1.1	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan (Pembuatan Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) pada Kawasan Perkotaan Tobadak	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)															
2.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten															
2.1.1	Pembangunan Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
J	Perwujudan Jaringan Prasarana Lainnya															
a	Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana															
1	Program Penanggulangan Bencana															
1.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
1.1.1	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Pembuatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir)	Kawasan Perkotaan Tobadak	APBD Kabupaten	-	-	Penanggulangan Bencana	-									
1.1.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Pemasangan Rambu Evakuasi pada Kawasan Rawan Bencana Banjir Genangan)	Kawasan Perkotaan Tobadak	APBD Kabupaten	-	-	Penanggulangan Bencana	-									
1.1.3	Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana yang Terintegrasi dengan Tempat Evakuasi	- Topoyo – Tarailu melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C - Karossa – Topoyo melintas di SWP I.C - Akses Pelabuhan Budong-Budong (Polohu-Babana-Pelabuhan) melintas di SWP I.A - Jalan Nasional – Mahahe melintas di SWP I.A - Topoyo - Tumbu melintas di SWP I.B dan SWP I.C - Dalam KTM Tobadak melintas di SWP I.A - Jalan Nasional-Pangalloang-Patulana melintas di SWP I.B - Jalan Pasar Baru melintas di SWP I.C - Jalan Penghubung Dusun Ngapaboa melintas di SWP I.C - Paraili – Kabubu melintas di SWP I.C - Pasar Baru – Waeputeh melintas di SWP I.C - Waeputeh – Bayor melintas di SWP I.B dan SWP I.C - Waeputeh – Tappilina melintas di SWP I.C - Topoyo-Tobadak melintas di SWP I.A	APBD Kabupaten	-	-	Penanggulangan Bencana	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
		- jalur evakuasi lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C														
b	Perwujudan Tempat Evakuasi															
1	Program Penanggulangan Bencana															
1.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
1.1.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Tempat Evakuasi Sementara	- Lapangan Babana terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 - gedung lapangan futsal terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 - Lapangan Kantor Bupati Mamuju Tengah terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 - Lahan terbuka terdapat di: SWP I.A pada Blok I.A.3 SWP I.B pada Blok I.B.1 SWP I.C pada Blok I.C.2 - Perkebunan terdapat di: SWP I.A pada Blok I.A.3 SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	-	Penanggulangan Bencana	-									
1.1.3	Penyediaan dan Pemeliharaan Tempat Evakuasi Akhir	- RSUD Kabupaten Mamuju Tengah terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 - Mesjid Raya Nurul Hidayah terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 - SMAN 1 Topoyo terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Penanggulangan Bencana	-									
1.1.4	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Penyediaan Areal Evakuasi pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman & Lapangan Olah Raga dan Lapangan Terbuka)	Kawasan Perkotaan Tobadak	APBD Kabupaten	-	-	Penanggulangan Bencana	-									
1.1.5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Penyediaan Areal Evakuasi pada Sarana Prasarana Umum (Fasilitas Umum dan Sosial) Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, lainnya), Administrasi & Pelayanan Publik (Kantor Kecamatan &	Kawasan Perkotaan Tobadak	APBD Kabupaten	-	-	Penanggulangan Bencana	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
	Kantor Kelurahan), Peribadatan, Pendidikan)															
c	Perwujudan Jalur Sepeda															
1	Program Penyelenggaraan Jalur Sepeda															
1.1	Pengembangan dan Pembangunan Jalur Sepeda	- Topoyo – Tarailu melintas di SWP I.A - Karossa – Topoyo melintas di SWP I.C - Akses Pelabuhan Budong-Budong (Polohu-Babana-Pelabuhan) melintas di SWP I.A - Jalan Nasional – Mahahe melintas di SWP I.A - Topoyo – Tumbu melintas di SWP I.C - Dalam KTM Tobadak melintas di SWP I.A - Jalan Nasional-Pangalloang-Patulana melintas di SWP I.B - Jalan Pasar Baru melintas di SWP I.C - Jalan Penghubung Dusun Ngapaboa melintas di SWP I.C - Paraili – Kabubu melintas di SWP I.C - Pasar Baru – Waeputeh melintas di SWP I.C - Waeputeh – Bayor melintas di SWP I.B - Waeputeh – Tappilina melintas di SWP I.C - Dalam Kota Topoyo melintas di SWP I.B - Jalan Dusun Benteng melintas di SWP I.A - Jalan Nasional - Lembah Deko melintas di SWP I.C - Jalan Nasional-Penghubung Pasar Baru melintas di SWP I.C - Jalan Penghubung Akses Pasar Baru melintas di SWP I.C - Pasar Lama – Paraili melintas di SWP I.B dan SWP I.C - Sekoci - Paraili melintas di SWP I.B dan SWP I.C - jalur sepeda lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
1.2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Jalur Sepeda	- Topoyo – Tarailu melintas di SWP I.A - Karossa – Topoyo melintas di SWP I.C - Akses Pelabuhan Budong-Budong (Polohu-Babana-Pelabuhan) melintas di SWP I.A - Jalan Nasional – Mahahe melintas di SWP I.A - Topoyo – Tumbu melintas di SWP I.C - Dalam KTM Tobadak melintas di SWP I.A - Jalan Nasional-Pangalloang-Patulana melintas di SWP I.B - Jalan Pasar Baru melintas di SWP I.C - Jalan Penghubung Dusun Ngapaboa melintas di SWP I.C - Paraili – Kabubu melintas di SWP I.C - Pasar Baru – Waeputeh melintas di SWP I.C - Waeputeh – Bayor melintas di SWP I.B - Waeputeh – Tappilina melintas di SWP I.C - Dalam Kota Topoyo melintas di SWP I.B - Jalan Dusun Benteng melintas di SWP I.A - Jalan Nasional - Lembah Deko melintas di SWP I.C - Jalan Nasional-Penghubung Pasar Baru melintas di SWP I.C - Jalan Penghubung Akses Pasar Baru melintas di SWP I.C - Pasar Lama – Paraili melintas di SWP I.B dan SWP I.C - Sekoci - Paraili melintas di SWP I.B dan SWP I.C - jalur sepeda lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.3	Penyediaan Fasilitas Pendukung Jalur Sepeda	- Topoyo – Tarailu melintas di SWP I.A - Karossa – Topoyo melintas di SWP I.C - Akses Pelabuhan Budong-Budong (Polohu-Babana-Pelabuhan) melintas di SWP I.A	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
		- Jalan Nasional – Mahahe melintas di SWP I.A - Topoyo – Tumbu melintas di SWP I.C - Dalam KTM Tobadak melintas di SWP I.A - Jalan Nasional-Pangalloang-Patulana melintas di SWP I.B - Jalan Pasar Baru melintas di SWP I.C - Jalan Penghubung Dusun Ngapaboa melintas di SWP I.C - Paraili – Kabubu melintas di SWP I.C - Pasar Baru – Waeputeh melintas di SWP I.C - Waeputeh – Bayor melintas di SWP I.B - Waeputeh – Tappilina melintas di SWP I.C - Dalam Kota Topoyo melintas di SWP I.B - Jalan Dusun Benteng melintas di SWP I.A - Jalan Nasional - Lembah Deko melintas di SWP I.C - Jalan Nasional-Penghubung Pasar Baru melintas di SWP I.C - Jalan Penghubung Akses Pasar Baru melintas di SWP I.C - Pasar Lama – Paraili melintas di SWP I.B dan SWP I.C - Sekoci - Paraili melintas di SWP I.B dan SWP I.C - jalur sepeda lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C														
d	Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki															
1	Program Penyelenggaraan Jaringan Pejalan Kaki															
1.1	Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki	- Topoyo – Tarailu melintas di SWP I.A - Karossa – Topoyo melintas di SWP I.C - Akses Pelabuhan Budong-Budong (Polohu-Babana-Pelabuhan) melintas di SWP I.A - Jalan Nasional – Mahahe melintas di SWP I.A - Topoyo – Tumbu melintas di SWP I.C	APBD Provinsi	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
		- Dalam KTM Tobadak melintas di SWP I.A - Jalan Nasional-Pangalloang-Patulana melintas di SWP I.B - Jalan Pasar Baru melintas di SWP I.C - Jalan Penghubung Dusun Ngapaboa melintas di SWP I.C - Paraili – Kabubu melintas di SWP I.C - Pasar Baru – Waeputeh melintas di SWP I.C - Waeputeh – Bayor melintas di SWP I.B - Waeputeh – Tappilina melintas di SWP I.C - Dalam Kota Topoyo melintas di SWP I.B - Jalan Dusun Benteng melintas di SWP I.A - Jalan Nasional - Lembah Deko melintas di SWP I.C - Jalan Nasional-Penghubung Pasar Baru melintas di SWP I.C - Jalan Penghubung Akses Pasar Baru melintas di SWP I.C - Pasar Lama – Paraili melintas di SWP I.B dan SWP I.C - Sekoci - Paraili melintas di SWP I.B dan SWP I.C - jaringan pejalan kaki melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C														
1.2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pejalan Kaki	- Topoyo – Tarailu melintas di SWP I.A - Karossa – Topoyo melintas di SWP I.C - Akses Pelabuhan Budong-Budong (Polohu-Babana-Pelabuhan) melintas di SWP I.A - Jalan Nasional – Mahahe melintas di SWP I.A - Topoyo – Tumbu melintas di SWP I.C - Dalam KTM Tobadak melintas di SWP I.A - Jalan Nasional-Pangalloang-Patulana melintas di SWP I.B - Jalan Pasar Baru melintas di SWP I.C - Jalan Penghubung Dusun Ngapaboa melintas di SWP I.C	APBD Provinsi	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
		- Paraili – Kabubu melintas di SWP I.C - Pasar Baru – Waeputeh melintas di SWP I.C - Waeputeh – Bayor melintas di SWP I.B - Waeputeh – Tappilina melintas di SWP I.C - Dalam Kota Topoyo melintas di SWP I.B - Jalan Dusun Benteng melintas di SWP I.A - Jalan Nasional - Lembah Deko melintas di SWP I.C - Jalan Nasional-Penghubung Pasar Baru melintas di SWP I.C - Jalan Penghubung Akses Pasar Baru melintas di SWP I.C - Pasar Lama – Paraili melintas di SWP I.B dan SWP I.C - Sekoci - Paraili melintas di SWP I.B dan SWP I.C - jaringan pejalan kaki melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C														
1.3	Penyediaan Jalur Penyebrangan Pejalan Kaki	- Topoyo – Tarailu melintas di SWP I.A - Karossa – Topoyo melintas di SWP I.C - Akses Pelabuhan Budong-Budong (Polohu-Babana-Pelabuhan) melintas di SWP I.A - Jalan Nasional – Mahahe melintas di SWP I.A - Topoyo – Tumbu melintas di SWP I.C - Dalam KTM Tobadak melintas di SWP I.A - Jalan Nasional-Pangalloang-Patulana melintas di SWP I.B - Jalan Pasar Baru melintas di SWP I.C - Jalan Penghubung Dusun Ngapaboa melintas di SWP I.C - Paraili – Kabubu melintas di SWP I.C - Pasar Baru – Waeputeh melintas di SWP I.C - Waeputeh – Bayor melintas di SWP I.B - Waeputeh – Tappilina melintas di SWP I.C	APBD Provinsi	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
		- Dalam Kota Topoyo melintas di SWP I.B - Jalan Dusun Benteng melintas di SWP I.A - Jalan Nasional - Lembah Deko melintas di SWP I.C - Jalan Nasional-Penghubung Pasar Baru melintas di SWP I.C - Jalan Penghubung Akses Pasar Baru melintas di SWP I.C - Pasar Lama – Paraili melintas di SWP I.B dan SWP I.C - Sekoci - Paraili melintas di SWP I.B dan SWP I.C - jaringan pejalan kaki melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C														
II	**PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG**															
A	Perwujudan Zona Lindung															
a	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat															
1	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum pada Sub-Zona Perlindungan Setempat															
1.1	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum															
1.1.1	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Penyusunan Rencana Tindak Pengamanan dan Pembebasan Lahan Kawasan Sempadan Sungai)	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.2	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Pembebasan Lahan Sempadan Sungai Untuk Pembangunan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Sebagai Fungsi RTH dan RTNH)	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan - SWP I.C pada Blok I.C.1	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Sub-Zona Perlindungan Setempat															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
2.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
2.1.1	Pendataan dan Pemetaan Pengamanan Kawasan Sempadan Sungai	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2.1.2	Penyusunan Rencana Tindak Pengamanan dan Pembebasan Lahan Kawasan Sempadan Sungai	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2.1.3	Pemasangan Papan Informasi/ Peringatan Ketentuan Kawasan Sempadan Sungai	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2.1.4	Penataan Kawasan Sempadan Sungai Untuk Menunjang Normalisasi dan Revitalisasi Sungai, Pengembangan Wisata Sungai Dan Penyediaan RTH	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
b	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau															
1	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum															
1.1	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum															
1.1.1	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Pengadaan Lahan Untuk Pemenuhan Kebutuhan RTH Publik)	Kawasan Perkotaan Tobadak	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Lingkungan Hidup	Swasta									
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)															
2.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota															
2.1.1	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Ketersediaan RTH minimal 30% dari Luas Wilayah Perencanaan	Kawasan Perkotaan Tobadak	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Lingkungan Hidup	Swasta									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
2.1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Pembuatan Taman Kota Baru)	Kawasan Perkotaan Tobadak	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									
2.1.3	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Pembuatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA))	Kawasan Perkotaan Tobadak	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									
2.1.4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Pembangunan Taman, Lapangan Terbuka & Olah Raga Skala Kecamatan)	Kawasan Perkotaan Tobadak	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									
2.1.5	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Pembuatan Taman Lingkungan Perumahan Dengan Konsep Taman Air Untuk Penyediaan Kolam Retensi/Detensi Air)	Kawasan Perkotaan Tobadak	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									
2.1.6	Pembuatan Aturan Kewajiban Penyediaan RTH Publik Pada Kawasan Budi Daya (Perumahan, Industri, Pergudangan, Perkantoran, SPU, Perdagangan dan Jasa)	Kawasan Perkotaan Tobadak	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Lingkungan Hidup	Swasta									
2.1.7	Penanaman dan Perawatan Taman pada Sub-Zona Rimba Kota	- SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP 1.C pada Blok 1.C.1	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									
2.1.8	Pemeliharaan Taman pada Sub-Zona Rimba Kota	- SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP 1.C pada Blok 1.C.1	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									
2.1.9	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung pada Sub-Zona Rimba Kota	- SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP 1.C pada Blok 1.C.1	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									
2.1.10	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendukung pada Sub-Zona Rimba Kota	- SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP 1.C pada Blok 1.C.1	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
2.1.11	Penanaman dan Perawatan Taman pada Sub-Zona Taman Kota	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									
2.1.12	Pemeliharaan Taman pada Sub-Zona Taman Kota	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									
2.1.13	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung pada Sub-Zona Taman Kota	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									
2.1.14	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendukung pada Sub-Zona Taman Kota	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									
2.1.15	Penanaman dan Perawatan Taman pada Sub-Zona Taman Kelurahan	- SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									
2.1.16	Pemeliharaan Taman pada Sub-Zona Taman Kelurahan	- SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									
2.1.17	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung pada Sub-Zona Taman Kelurahan	- SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									
2.1.18	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendukung pada Sub-Zona Taman Kelurahan	- SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									
2.1.15	Pendataan dan Pengukuran Tata Batas Pemakaman Umum dan Privat	Kawasan Perkotaan Tobadak	APBD Kabupaten	-	-	- Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Lingkungan Hidup	-									
2.1.16	Pembuatan Kesepakatan Status/Legalitas Pemakaman Privat dengan Ahli Waris untuk Pemanfaatan RTH Publik	Kawasan Perkotaan Tobadak	APBD Kabupaten	-	-	- Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Masyarakat									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
						- Lingkungan Hidup										
2.1.17	Penataan dan Pemeliharaan RTH untuk Fungsi Sub-Zona Pemakaman	SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	-									
2.1.18	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung pada Sub-Zona Pemakaman	SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	-									
2.1.19	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendukung pada Sub-Zona Pemakaman	SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	-									
2.1.20	Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan pada Sub-Zona Jalur Hijau	SWP I.A pada Blok I.A.3	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									
2.121	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung pada Sub-Zona Jalur Hijau	SWP I.A pada Blok I.A.3	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									
2.1.22	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendukung pada Sub-Zona Jalur Hijau	SWP I.A pada Blok I.A.3	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									
c	Perwujudan Zona Badan Air															
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Sub-Zona Badan Air															
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Normalisasi/Restorasi/ Pemeliharaan Sungai (Normalisasi Sungai)	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
B	Perwujudan Zona Budi Daya															
a	Perwujudan Zona Pertanian															
1	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada Sub-Zona Perkebunan															
1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
1.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	- SWP I.A pada Blok I.A.1 - SWP I.B pada Blok I.B.1 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	- APBN - APBD Kabupaten	Ketahanan Pangan dan Pertanian	Ketahanan Pangan dan Pertanian	Ketahanan Pangan dan Pertanian	-									
1.1.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	- SWP I.A pada Blok I.A.1 - SWP I.B pada Blok I.B.1 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	- APBN - APBD Kabupaten	Ketahanan Pangan dan Pertanian	Ketahanan Pangan dan Pertanian	Ketahanan Pangan dan Pertanian	-									
1.1.3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	- SWP I.A pada Blok I.A.1 - SWP I.B pada Blok I.B.1 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	- APBN - APBD Kabupaten	Ketahanan Pangan dan Pertanian	Ketahanan Pangan dan Pertanian	Ketahanan Pangan dan Pertanian	-									
1.1.4	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	- SWP I.A pada Blok I.A.1 - SWP I.B pada Blok I.B.1 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	- APBN - APBD Kabupaten	Ketahanan Pangan dan Pertanian	Ketahanan Pangan dan Pertanian	Ketahanan Pangan dan Pertanian	-									
b	Perwujudan Zona Perumahan															
1	Program Pengembangan Perumahan															
1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan															
1.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik (Pembangunan Baru dan Pengembangan Perumahan (*Infill Development*))	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta									
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (Pengaturan dan Penataan Pembangunan Rumah Swadaya)	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	- APBN - APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	- Perencanaan Pembangunan - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Pengembangan Rumah Susun Komersial (Apartemen, Komodomunium, dll))	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta									
1.1.4	Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	- SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta									
1.1.5	Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta									
1.1.6	Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	- SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta									
1.1.6	Perwujudan RTH Privat Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Minimal 10% Dari Luas Kaveling	- SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Lingkungan Hidup	Swasta									
1.1.6	Perwujudan RTH Privat Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Minimal 15% Dari Luas Kaveling	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Lingkungan Hidup	Swasta									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
1.1.7	Perwujudan RTH Privat Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Minimal 25% Dari Luas Kaveling	- SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Lingkungan Hidup	Swasta									
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
2.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
2.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (Penyediaan PSU Rumah Swadaya, Rumah Umum dan Komersial)	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta									
2.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (Pendataan dan Pemetaan Kewajiban Penyediaan Fasum/Fasos dan RTH Perumahan Oleh Pengembang)	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta									
3	Program Kawasan Permukiman															
3.1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha															
3.1.1	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	- APBN - APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	- Perencanaan Pembangunan - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-									
3.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh)	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	- APBN - APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	- Perencanaan Pembangunan - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
3.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh (Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman (Pembangunan PSU dan RTLH)	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	- APBN - APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	- Perencanaan Pembangunan - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-									
c	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum															
1	Program Pengelolaan Pendidikan															
1.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas															
1.1.1	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Sub-Zona SPU Skala Kota	- SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	- APBD Provinsi - Swasta	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Pendidikan	Pendidikan	Swasta									
1.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama															
1.2.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	- SWP I.A pada Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Pendidikan	Swasta									
1.2.2	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	- SWP I.A pada Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Pendidikan	Swasta									
1.3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar															
1.3.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Sub-Zona SPU Skala Kota	SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kabupaten Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Pendidikan	Swasta									
1.3.2	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Sub-Zona SPU Skala Kota	SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kabupaten Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Pendidikan	Swasta									
1.3.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	- SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.2; dan - SWP I.C pada Blok I.C.1	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Pendidikan	Swasta									
1.3.4	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	- SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kabupaten Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Pendidikan	Swasta									
1.3.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	SWP I.C pada Blok I.C.1	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Pendidikan	Swasta									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
1.3.6	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kabupaten Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Pendidikan	Swasta									
1.4	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)															
1.4.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Pendidikan	Swasta									
1.4.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Pendidikan	Swasta									
1.4.3	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Pendidikan	Swasta									
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat															
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota															
2.1.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit pada Sub-Zona SPU Skala Kota	SWP I.A pada Blok I.A.3	Swasta	-	Kesehatan	Kesehatan	Swasta									
2.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Kesehatan	-									
2.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Pembantu pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	SWP I.A pada Blok I.A.1	APBD Kabupaten	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Kesehatan	-									
2.1.4	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Pembangunan Baru Puskesmas Pembantu) pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Kabupaten	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Kesehatan	-									
3	Program Pengelolaan Peribadatan															
3.1	Pengelolaan Peribadatan															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
3.1.1	Penataan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Fasilitas Peribadatan pada Sub-Zona SPU Skala Kota	- SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
3.1.2	Penataan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Fasilitas Peribadatan pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
3.1.3	Penataan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Fasilitas Peribadatan pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
4	Program Rencana Kawasan Sarana Pelayanan Umum															
4.1	Pengelolaan Kawasan Sarana Pelayanan Baru															
4.1.1	Pembangunan Fasilitas Pelayanan Umum Baru pada Sub-Zona SPU Skala Kota	- SWP I.A pada Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	- Perencanaan Pembangunan Daerah - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
4.1.2	Pembangunan Fasilitas Pelayanan Umum Baru pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	- Perencanaan Pembangunan Daerah - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
4.1.3	Pembangunan Fasilitas Pelayanan Umum Baru pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	- Perencanaan Pembangunan Daerah - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)															
5.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
4.1.1	Perwujudan RTH Privat Sub-Zona SPU Skala Kota Dengan Minimal 20% Dari Luas Kaveling	- SWP I.A pada Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									
4.1.2	Perwujudan RTH Privat Sub-Zona SPU Skala Kecamatan Dengan Minimal 30% Dari Luas Kaveling	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									
4.1.3	Perwujudan RTH Privat Sub-Zona SPU Skala Kelurahan Dengan Minimal 30% Dari Luas Kaveling	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									
d	Perwujudan Zona Campuran															
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang															
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (Penataan dan Pengembangan Kawasan Campuran Perumahan, Perkantoran dan Perdagangan Jasa)	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.2	Perwujudan RTH privat Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang Dengan Minimal 30% Dari Luas Kaveling	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	Swasta									
e	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa															
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang															
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (Penataan dan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perdagangan dan Perindustrian	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
	Pengembangan Kawasan Perdagangan Jasa)															
2	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan															
2.1	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan															
2.1.1	Perencanaan Penataan Sarana dan Prasarana PKL (Penataan dan Revitalisasi Kawasan Sektor Informal) pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	- SWP I.A pada Blok I.A.1 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perdagangan dan Perindustrian	-									
2.1.2	Perencanaan Penataan Sarana dan Prasarana PKL (Penataan dan Revitalisasi Kawasan Sektor Informal) pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perdagangan dan Perindustrian	-									
3	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya															
3.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota															
3.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan (Penataan Sarana Perparkiran)	Kawasan Perkotaan Tobadak	APBD Kabupaten	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perdagangan dan Perindustrian	-									
3.1.2	Perwujudan RTH privat Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan minimal 15% dari luas kaveling	- SWP I.A pada Blok I.A.1 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perdagangan dan Perindustrian - Lingkungan Hidup	Swasta									
3.1.3	Perwujudan RTH privat Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan minimal 20% dari luas kaveling	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 - SWP I.C pada Blok I.C.2	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perdagangan dan Perindustrian - Lingkungan Hidup	Swasta									
f	Perwujudan Zona Perkantoran															
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub-Zona Perkantoran															
1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
1.1.1	Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintahan	SWP I.A pada Blok I.A.3	- APBN - APBD Kabupaten	- Pertanahan - Kejaksaan - KPU	-	- Perencanaan Pembangunan Penelitian dan	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
						Pengembangan Daerah - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.1.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.2	- APBN - APBD Kabupaten - Swasta	- Pertanahan - Kejaksaan - KPU - Agama	-	Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
1.1.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.2	- APBN - APBD Kabupaten - Swasta	- Pertanahan - Kejaksaan - KPU - Agama	-	Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
1.1.4	Perwujudan RTH privat Zona Perkantoran dengan minimal 30% dari luas kaveling	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.2	- APBN - APBD Kabupaten - Swasta	- Pertanahan - Kejaksaan - KPU - Agama	-	- Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
g	Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan															
1	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional pada Sub-Zona Pengelolaan Persampahan															
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Peningkatan TPS3R	SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	-									
1.1.2	Rehabilitasi TPS3R	SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	-									
1.1.1	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028 - 2029			
								2023	2024	2025	2026	2027				
1.1.3	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sarana TPS3R	SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-									
1.1.4	Perwujudan RTH privat Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan minimal 20% dari luas kaveling	SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-									
h	Perwujudan Zona Transportasi															
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Sub-Zona Transportasi															
1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang															
1.1.1	Pembangunan Gedung Terminal	SWP I.A pada Blok I.A.1	APBD Provinsi	-	-	Perhubungan	-									
1.1.2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	SWP I.A pada Blok I.A.1	APBD Provinsi	-	-	Perhubungan	-									
1.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	SWP I.A pada Blok I.A.1	APBD Provinsi	-	-	Perhubungan	-									
i	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan															
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten															
1.1.1	Pengembangan Sarana Prasaranan Sub-Zona Pertahanan dan Kemananan	SWP 1.A pada Blok 1.A.3	APBN	Pertahanan	-	-	-									
1.1.2	Pengendalian dan Penataan Kawasan Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan	SWP 1.A pada Blok 1.A.3	APBN	Pertahanan	-	-	-									
1.1.3	Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang di Sekitar Zona Pertahanan Dan Keamanan	SWP 1.A pada Blok 1.A.3	APBN	Pertahanan	-	Pekerjaan Umum dan Perumahan	-									
1.1.2	Perwujudan RTH privat Sub-Zona Pergudangan dengan minimal 30% dari luas kaveling	SWP 1.A pada Blok 1.A.3	Swasta	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perdagangan dan Perindustrian - Lingkungan Hidup	Swasta									

BUPATI MAMUJU TENGAH,

H. ARAS TAMMAUNI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK TAHUN 2023-2042

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN (ITBX)

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA														
			Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			PS	RTH 1	RTH 2	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BA	P-2	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-1	K-2	KT	PP	TR	HK
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Air	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
A.	**RUANG TERBUKA HIJAU**																							
001	Taman Lingkungan	81300	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
002	Taman Kelurahan	81300	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
003	Taman Kecamatan	81300	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
004	Taman Kota	81300	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
005	Jalur Hijau dan Pulau Jalan	81300	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
006	Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan YBDI	96910	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
007	Rimba Kota	81300	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
008	Jalur Hijau Saluran Udara Tegangan Tinggi	81300	B1	I	I	I	I	I	B1	T3,B1	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3
B.	**RUANG TERBUKA NON HIJAU**																							
009	Lapangan	93114	B1,B2,B3	B1,B2,B3,B4,B5	B1,B2,B3,B4,B5	B1,B2,B3,B4,B5	B1,B3,B4	X	X	T1,T2,B1,B2, B3,B4	T2,B2,B5	T2,B1,B2,B3,B5	T2,B1,B2,B3,B5	T1,T2,B1,B2, B3,B5	T1,T2,B1,B2, B3,B5	T1,T2,B1,B2, B3,B5	T1,T2,B1,B2, B3,B5	T1,T2,B1,B2, B3,B5	T1,T2,B1,B2, B3,B5	T1,T2,B1,B2, B3,B5	T1,T2,B1,B2, B3,B5	T1,T2,B1,B2, B3,B5	T1,T2,B1,B2, B3,B5	T1,T2,B1,B2, B3,B5
010	Tempat Parkir Umum	52215	B1,B2	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B4	B1,B2,B4	X	T2,B1,B2,B5	T2,B1,B2,B5	T2,B1,B2,B5	T2,B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	T1,B1,B4	I	B1,B2,B5
011	Taman Bermain dan Rekreasi	93211	B1,B2,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3,B4	X	X	T1,B1,B2,B3, B4	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	X	X	B1,B3
012	Kolam Retensi/ Embung	42911	B1	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	T1,B1	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	B1,B4
013	Plasa	42929	B1,B2	B2,B4,B5	B2,B4,B5	B2,B4,B5	B4	B2,B4	X	T1,B2,B4	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1
014	Trotoar	42101	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	B1
C.	**PERUMAHAN**																							
015	Rumah Tinggal Tunggal	41011	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	B1	B1	B1	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X
016	Rumah Deret	"41011","68111"	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X
017	Rumah Adat	41011	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	T2,B1,B3,B4	B1	B1	B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1
018	Kompleks Perumahan	41011	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	X	T2,B1	T2,B1	T2,B1	X	X	X	T2,B1
019	Asrama/ Mess	55900	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	T2,B1	X	X	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	X	T2,B1	T2,B1
020	Hunian Vertikal/ Rumah Susun	"41011","68111"	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3,B5	B1,B3,B5	B1,B3,B5	X	X	X	B1,B3,B5	T2,B1	T2,B1	T2,B1	X	T2,B1	X
021	Panti Jompo	"87301","87302"	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X
D.	**PERDAGANGAN DAN JASA**																							
D.1.	**JASA PERBENGKELAN**																							
022	Reparasi Produk Logam Pabrikasi,Mesin dan Peralatan	3311	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3,B4	T1,T3,B1,B3,B4	T1,T3,B1,B3,B4	X	X	X	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	X	X	B1,B3,B4	X
023	Reparasi Mesin	3312	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3,B4	T1,T3,B1,B3,B4	T1,T3,B1,B3,B4	X	X	X	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	X	X	B1,B3,B4	X
024	Reparasai Peralatan Elektronik dan Optik	3313	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3,B4	T1,T3,B1,B3,B4	T1,T3,B1,B3,B4	X	X	X	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	X	X	B1,B3,B4	X
025	Reparasi Peralatan Listrik	3314	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3,B4	T1,T3,B1,B3,B4	T1,T3,B1,B3,B4	X	X	X	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	X	X	B1,B3,B4	X
026	Reparasi Alat Angkutan,Bukan Kendaraan Bermotor	3315	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3,B4	T1,T3,B1,B3,B4	T1,T3,B1,B3,B4	X	X	X	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	X	X	B1,B3,B4	X
027	Reparasi Peralatan Lainnya	33190	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	B1,B3,B4	X
D.2.	**AKOMODASI**																							
028	Hotel Bintang	55110	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	X	B1,B3,B5	B1,B3,B5	B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	X	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5
029	Hotel Melati	55120	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	B1,B3,B5	B1,B3,B5	B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	X	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5
030	Guest House/ Villa	55193	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	B1,B3,B5	B1,B3,B5	B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3, B5	X	T1,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3, B5
031	Pondok Wisata (*Homestay*)	55130	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	B1,B3,B5	B1,B3,B5	B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3, B5	X	T1,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3, B5
032	Kost	55900	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B5	T1,T3,B5	T1,T3,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1,T3,B5
D.3.	**PERDAGANGAN**																							
033	Warung Makan	56102	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	B1,B3	B1,B3
034	Supermarket	47111	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B3,B5	T1,T3,B3,B5	X	T1,T3,B3,B5	X	X	I	B3,B5	B3,B5	X	X	X	T1,T3,B3,B5
035	Minimarket	47111	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3	T1,T3
036	Toko Kelontong/Kios	47192	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1,T3	X	T1,T3	I
037	Toko Bahan Bangunan,Perkakas,dan Pertukangan	4752	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	T1,T3
038	Perdagangan Eceran Beras	47241	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	T1,T3	I	I	X	X	X	X
039	Toko Makanan/Minuman	47112	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	T1	T1
040	Toko Peralatan Rumah Tangga	47599	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1	I	I	T1,T3	X	X	T1,T3
041	Toko Plastik	47737	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1	I	I	T1,T3	X	X	T1,T3
042	Toko Perlengkapan Kendaraan Bermotor	47736	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1	I	I	T1,T3	X	T1,T3	T1,T3
043	Toko Obat atau Apotek	47721	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,B1	B1	B1	T1,T3,B1	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1
044	Toko Alat dan Bahan Farmasi	47725	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	X	T1,T3,B1	X	X	B1	B1	B1	T1,T3,B1	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1
045	Toko Pakaian dan Aksesories	47711	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1	I	I	T1,T3	X	X	T1,T3
046	Toko Peralatan dan Pasokan Pertanian	47796	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1	I	I	T1,T3	X	X	T1,T3
047	Toko Bahan Kimia	47773	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	X	T1,T3,B1	X	X	B1	I	I	T1,T3,B1	X	X	T1,T3,B1
048	Toko Hewan Peliharaan (*Pet Shop*)	47751	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1	I	I	T1,T3	X	X	T1,T3
049	Toko Musik dan Peralatan Musik	47597	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1	I	I	T1,T3	X	X	T1,T3
050	Toko Meubel/ Furniture	47591	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1	I	I	T1,T3	X	X	T1,T3
051	Toko Tanaman	47762	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1	I	I	T1,T3	X	X	T1,T3
052	Toko Peralatan Olahraga	47630	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1	I	I	T1,T3	X	T1,T3,B1,B3	X
053	SPBE	47301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	T1,T3,B1,B3	B1,B3
054	SPBU / SPBN	47301	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	B1,B3	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	T1,T3,B1,B3	B1,B3

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA														
			Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			PS	RTH 1	RTH 2	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BA	P-2	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-1	K-2	KT	PP	TR	HK
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Air	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
055	Pertashop	47301	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	B1,B3	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	B1,B3	B1,B3
056	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	47772	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	B1,B3	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	B1,B3
057	Showroom Mobil	4510	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1,T3	I	I	T1,T3	X	T1,T3	T1,T3
058	Showroom Motor	4540	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	X	X	T1,T3,B1	B1	B1	T1,T3,B1	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1
059	Pasar Hobi	94990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	X	X	T1,T3	I	I	X	X	X	T1,T3
D.4.	PERDAGANGAN TIDAK MENETAP DAN PUSAT PERBELANJAAN																						
060	Pasar Modern	47191	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X
061	Pasar Tradisional	47112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X
062	Pasar Induk	46900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X
063	Tempat Pelelangan Ikan	46206	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X
064	Pasar Hewan	47891	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X
065	Toserba *(Department Store)*	47191	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	X	X	X	I	B3,B5	B3,B5	X	X	X	X
066	Penyaluran Grosir	46900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
D.5.	KULINER / *AHUSEMENT*																						
067	Kantin/ Kedai	56103	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	B1,B3	B1,B3
068	Restoran/ Rumah Makan	56101	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	B1,B3	T1,T3,B1,B3
069	Penyediaan Makanan Keliling/ Tempat Tidak Tetap	56104	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	B1,B3	B1,B3
070	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	56109	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	B1,B3	B1,B3
071	Rumah Minum/ Kafe/ Coffee Shop	56303	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	I	X	T1,T3	T1,T3
072	Klub Malam/ Kegiatan Hiburan Malam	93291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1,B3	T3,B1,B3	T3,B1,B3	X	X	X	X
073	Karaoke	93292	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	T1,T3,B1,B3	X	X	T1,T3,B1,B3
D.6.	JASA PERKOTAAN																						
074	ATM	66420	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I
075	Jasa Lembaga Keuangan	"64111","64121","64122","64123","64131","64132","63141","64142","64143","64144","64145"	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B5	T1,T3,B5	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1	I	I	I	X	T1,T3	T1,T3
076	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya,Bukan Asuransi,Penjaminan,dan Dana Pensiun	6491	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B5	T1,T3,B5	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1	I	I	I	X	T1,T3	T1,T3
077	Pegadaian	6492	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B5	T1,T3,B5	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1	I	I	I	X	T1,T3	T1,T3
078	Jasa Asuransi dan Penjaminan	651	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1	I	I	I	X	X	T1,T3,B1
079	Jasa Percetakan	1811	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,B1	B1	B1	T1,T3,B1	X	X	T1,T3,B1
080	Jasa Penitipan Hewan	96990	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1	I	I	T1,T3	X	X	T1,T3
081	Jasa Penyewaan Alat Berat atau Perlengkapan Konstruksi	77311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T3	T3	X	X	T1,T3	X
082	Jasa Komunikasi	61100	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,B1	B1	B1	T1,T3,B1	X	X	T1,T3,B1
083	Jasa Pemakaman Keagamaan	94910	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1	I	I	T1,T3	X	T1,T3	T1,T3
084	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72102	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1	I	I	T1,T3	X	T1,T3	I
085	Jasa Perawatan atau Perbaikan atau Renovasi Barang	952	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	X	X	X	X	T1,B1	B1	B1	X	X	T1,B1	X
086	Jasa Bengkel Kendaraan	"45201","45407"	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	X	X	X	X	T1	I	I	X	X	T1	X
087	Jasa Pengecatan	43303	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	X	X	X	X	T1	I	I	X	X	T1	X
088	Jasa Las,Kenteng	"33111","33119"	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	X	X	X	X	T1,B1	B1	B1	X	X	T1,B1	X
089	Jasa Keterampilan (BLK)	85499	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1	I	I	T1,T3	X	X	I
090	Jasa Kebugaran (*Fitness*) dan Sanggar Senam	93116	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	T1,B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	T1,B1,B3	B1,B3
091	Jasa Pendidikan,Bimbel,Kursus,dan Sanggar Seni	85495	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1	I	I	T1,T3	X	T1	I
092	Jasa Transportasi (Pool Angkutan)	49429	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	I	T3	T3	X	X	I	X
093	Jasa Tour dan Travel (Khusus Tiket dan Paket Wisata)	7911	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1	I	I	I	X	T1	I
094	Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman (*Catering*)	56210	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1	I	I	T1,T3	X	T1	I
095	Jasa Pemasaran Properti	68200	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1	I	I	I	X	T1,T3	T1,T3
096	Jasa Perkantoran atau Bisnis Lainnya	82110	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1	I	I	I	X	T1,T3	T1,T3
097	Jasa Cuci Pakaian (*Laundry*)	81100	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1	I	I	T1,T3	X	T1,T3	T1,T3
098	Jasa Kesehatan dan Kecantikan	9611	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1	I	I	T1,T3	X	X	T1,T3
099	Jasa Penitipan Anak	85134	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1	I	I	T1,T3	X	T1,T3	I
100	Jasa Hiburan	90090	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1	I	I	T1,T3	X	T1,T3	T1,T3
101	Jasa Pencucian Mobil/ Motor	45202	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1	B1	B1	T1,T3	X	T1,T3	T1,T3
102	Aktivitas Pos	5310	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1	I	I	I	X	T1,T3	T1,T3
103	Jasa Pengiriman Barang/ Ekspedisi	5320	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1	I	I	I	X	I	T1,T3
104	Bongkar Muat Barang	52240	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1	I	I	X	X	X	X
105	Jasa Penjahit Pakaian/ *Tailor*	14120	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	T1	I	I	X	X	X	B1
106	Pembuatan Es (Kristal/ Kotak Bolong)	35302	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	B1	B1	B1	T1,B1	B1	B1	T1,T3,B1	X	X	X
107	Sirkuit Balap	93112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	T1,B1,B3	X
108	Pacuan Kuda	93112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	T1,B1,B3	X
109	Jasa Pengangkutan Limbah,Tinja dan Sampah	3701	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	T1,T3	I	I	T1,T3

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA													
			Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			PS	RTH 1	RTH 2	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BA	P-2	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-1	K-2	KT	PP	TR	HK
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Air	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
E.	**PERKANTORAN**																						
110	Kantor Pemerintah	84112	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	B4	B4	I
111	Kantor Pertahanan dan Keamanan	8422	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3,B5	T3	T3	T3	I	I	I	T1	I	I	I	X	T1,T3	I
112	Kantor Swasta	41012	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3,B5	T3,B3,B5	T3,B3,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3
113	Gedung Perkantoran/ Kantor Sewa	41012	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3,B5	T3,B3,B5	T3,B3,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3
114	Kantor Lembaga Legislatif	84111	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	X	T1,T3	T1,T3
115	Lembaga Eksekutif Keuangan,Perpajakan dan Bea Cukai	84113	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	X	T1,T3	T1,T3
116	Lembaga Eksekutif Perencanaan	84114	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	X	T1,T3	T1,T3
117	Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan Tugas Khusus	84115	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	X	T1,T3	T1,T3
118	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan,Pendidikan,Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial	8412	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	X	T1,T3	T1,T3
119	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis	8413	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	X	T1,T3	T1,T3
120	Kepolisian	84231	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	X	T1,T3	T1,T3
121	Pertahanan Sipil	84232	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	X	T1,T3	T1,T3
122	Lembaga Peradilan	84233	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	X	T1,T3	T1,T3
123	Pengacara	69101	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	X	T1,T3	T1,T3
124	Konsultan Hukum	69102	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	X	T1,T3	T1,T3
125	Konsultan Kekayaan Intelektual	69103	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	X	T1,T3	T1,T3
126	Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	69104	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	X	T1,T3	T1,T3
127	Aktivitas Akuntansi,Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	6920	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	X	T1,T3	T1,T3
128	Aktivitas Kontar Pusat	70100	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3
129	Aktivitas Konsultasi Manajemen	7020	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	X	T1,T3	T1,T3
130	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis YBDI	7110	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	X	T1,T3	T1,T3
131	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	"72101","72102","72103","72104","72105","72106"	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	X	T1,T3	T1,T3
132	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	7220	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	X	T1,T3	T1,T3
133	Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat	7320	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	X	T1,T3	T1,T3
134	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	"74311","74312","74321","74322"	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	X	T1,T3	T1,T3
135	Aktivitas Profesional Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	7490	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	B1	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1
136	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidanghubungan Luar Negeri	84210	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	X	T1,T3	T1,T3
F.	**INDUSTRI**																						
137	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	10110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X
138	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas	10120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X
139	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air	"10211","10212","10213","10214","10215","10216","10217","10221","10222"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X
140	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran	"10391","10392","10393","10399"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X
141	Industri Makanan	"10710","10712","1073","10740","10750","1076","1077"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X
142	Industri Minuman	"11040","11090"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X
143	Industri Tekstil	"131","139"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X
144	Industri Pakaian Jadi	"1411","14120"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X
145	Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	"1811","18120"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X
146	Industri Farmasi,Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	"2101","2102"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X
147	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer	26210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X
148	Industri Alat Musik	"32201","32202"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X
149	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum	281	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X
150	Industri Alat Angkutan Lainnya	"3091","30992","30990"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X
151	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu	"3011","30122"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X
152	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	30200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X
153	Industri Furnitur	3100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA														
			Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			PS	RTH 1	RTH 2	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BA	P-2	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-1	K-2	KT	PP	TR	HK
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Air	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
154	Industri Pengolahan Lainnya	3290	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2, B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3, B4,B5	X	X	X	X
155	Industri Pengolahan Baja Ringan	2410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
156	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai (*Batching Plant / U-Ditch/Cansteen)*	23957	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3 ,B4,B5	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2, B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3, B4,B5	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA													
			Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			PS	RTH 1	RTH 2	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BA	P-2	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-1	K-2	KT	PP	TR	HK
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Air	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
157	*Aspalt Mixing Plant*	23921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
158	AMDK (Air Minum Dalam Kemasan)	11051	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X
159	Industri Air Minum Isi Ulang	11052	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1,B2,B3,B4,B5	T3,B1,B2,B3,B4,B5	T3,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	T3,B1,B2,B3,B4,B5	T3,B1,B2,B3,B4,B5	T3,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X
160	Pembuatan Batu Bata/Batako/Bata Ringan dan Sejenisnya	23921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X
161	Industri Pengolahan Kedelai	1039	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X
162	Industri Pengolahan Limbah B3	37022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X
163	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	22220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X
G.	SARANA PELAYANAN UMUM																						
G.1.	PENDIDIKAN																						
164	Pendidikan Anak Usia Dini	"8513","85141","85142","85151","85161"	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	I
165	Pendidikan Dasar	"85111","85121","85143","85151","85162"	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	I
166	Pendidikan Menengah Pertama	"85112","85122","85144","8515","85163"	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	I
167	Pendidikan Menengah Atas	"85210","85220","85230","85240","85251","85252","8526","85270"	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	I
168	Perguruan Tinggi atau Akademi	"85311","85312","85321","85322","8533"	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	I	I	T1,T3	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	X	X	X	I
169	Pendidikan Informal atau Kursus	85440	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	I
170	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Lainnya	"8515","8516","8526","8527","8533","8545"	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	I	I	I	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	X	X	X	I
171	Perpustakaan	9101	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	B1	B1	B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	X	X	B1
172	Pendidikan Lainnya Pemerintah	85430	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	I
173	Pendidikan Lainnya	8549	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	I
174	Kegiatan Penunjang Pendidikan	85500	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	I
G.2.	KESEHATAN																						
175	Rumah Sakit Tipe A	"86101","86103"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	X	X	X	B1,B3
176	Rumah Sakit Tipe B	"86101","86103"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	X	X	X	B1,B3
177	Rumah Sakit Tipe C	"86101","86103"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	X	X	X	B1,B3
178	Rumah Sakit Tipe D	"86101","86103"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	X	X	X	B1,B3
179	Rumah Sakit Khusus	"86101","86103"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	X	X	X	B1,B3
180	Rumah Sakit Jiwa	"86101","86103"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	X	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	X	X	X	B1,B3
181	Laboratorium Kesehatan	86903	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	X	X	X	B1
182	Aktivitas Puskesmas	86102	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	B1	B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	X	X	X	B1
183	Puskesmas Pembantu	86102	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	B1	B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	X	X	X	B1
184	Posyandu	86109	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	I
185	Balai Pengobatan	86109	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	I
186	Pos Kesehatan	86109	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1	X	T1,T3	I
187	Aktivitas Praktik Dokter	86201	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	I
188	Aktivitas Praktik Dokter Spesialis	86202	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	I
189	Aktivitas Praktik Dokter Gigi	86203	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	I
190	Aktivitas Pelayanan Kesehatan lainnya	86901	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	X	X	X	B1
191	Aktivitas Klinik Pemerintah	86104	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	X	X	X	B1
192	Aktivitas Klinik Swasta	86105	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	X	X	X	B1
193	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	86902	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	X	X	X	B1
194	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	87100	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	I
195	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental,Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	8720	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	I
196	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	8730	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	I
197	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl	8790	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	I
198	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	"88101","88102"	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	I
199	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya	88991	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	I
G.3.	OLAHRAGA																						
200	Fasilitas Gelanggang/Arena	93113	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	X	X	X	T1,T3,B1,B3,B5
201	Sport Center	93119	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	X	X	X	T1,T3,B1,B3,B5
202	Fasilitas Stadion	93111	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3,B5	B1,B3,B5	B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	X	X	X	T1,T3,B1,B3,B5

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA												
			Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			PS	RTH 1	RTH 2	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BA	P-2	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-1	K-2	KT	PP	TR	HK
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Air	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
203	Kolam Renang Umum	93113	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3,B5	X	X	X	T1,T3,B1,B3, B5
204	Sirkuit	93112	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	B1,B5	B1,B5	X	X	X	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3,B5	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA														
			Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			PS	RTH 1	RTH 2	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BA	P-2	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-1	K-2	KT	PP	TR	HK
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Air	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
205	Fasilitas Olahraga Beladiri	93115	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3,B5	X	X	X	T1,T3,B1,B3, B5
206	Pusat Kebugaran/Fitness Centre	93116	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3,B5	X	X	X	T1,T3,B1,B3, B5
207	Fasilitas Olahraga Lainnya	93119	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3,B5	X	X	X	T1,T3,B1,B3, B5
G.4.	PERIBADATAN																							
208	Masjid	41019	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1	T1	T1	T1	X	T1	I	
209	Musala	41019	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1	T1	T1	T1	X	T1	I	
210	Gereja	41019	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1	T1	T1	T1	X	X	I	
211	Pura	41019	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1	T1	T1	T1	X	X	I	
212	Vihara	41019	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1	T1	T1	T1	X	X	I	
213	Kienteng	41019	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1	T1	T1	T1	X	X	I	
G.5.	SOSIAL BUDAYA																							
214	Gedung Pertemuan Lingkungan/Kota	41019	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	X	T1,B5	T1,B5	
215	Tugu/Monumen	41019	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	X	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	
216	Gedung Serba Guna	41019	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	X	X	T1,B5	
217	Balai Pertemuan dan Pameran	41019	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	T1,B5	X	X	I	
218	Pusat Informasi Lingkungan	41019	X	B4	B5	B4	B4	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	
219	Kantor Lembaga Sosial Kemasyarakatan	94990	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,B5	X	X	T1,B5	T1,B5	T1,B5	I	X	X	T1,B5	
220	Museum yang dikelola Pemerintah	91021	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	X	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	X	X	T1,B1,B3,B5	
221	Museum yang dikelola Swasta	91022	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	X	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	X	X	T1,B1,B3,B5	
222	Pos Jaga	41019	X	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
G.6.	TRANSPORTASI																							
223	Pelabuhan	52229	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	
224	Dermaga	"42913","52222"	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	
225	Angkutan Sungai,Danau Dan Penyeberangan	502	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	
226	Jembatan Timbang	52219	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	X	X	X	T1,B1	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,B1,B4	X	I	T1,B1,B4	
227	Aktivitas Terminal Darat	52211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	T1,B1	T1,B1,B4	
228	Terminal Tipe A	52211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	X	I	T1,B1,B4	
229	Terminal Tipe B	52211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	I	T1,B1,B4	
230	Terminal Tipe C	52211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	
231	Terminal Barang	52211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	
232	Aktivitas Stasiun Kereta Api	52212	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	B1,B3,B4	X	B1,B3,B4	B1,B3,B4	
233	Halte Angkutan Umum	52211	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	B1,B4	T1,B1,B4	I	B1,B4	
234	Garasi Bus/Pool Bus	52219	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B4	X	X	B4	X	I	B4	
235	Angkutan Bus Dalam Trayek	4921	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	B4	B4	B4	T1,B4	T1,B4	T1,B4	B4	X	I	B4	
236	Angkutan Melalui Saluran Pipa	49300	B1,B4	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	B1,B4	X	I	B1,B4	
237	Angkutan Darat Bukan Bus	494	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	X	X	
238	Garasi/Pool Truk	52219	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	
239	*Rest Area*	68111	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,B1,B5	X	X	T1,B1,B5	T1,B1,B5	T1,B1,B5	T1,B1,B5	X	T1,B1,B5	T1,B1,B5	
240	Landasan Pendaratan	52231	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
241	Bandar Udara	52231	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
242	JPO	42102	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1,B4	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	
243	Stasiun Pemadam Kebakaran	84234	X	T1	T2	T1	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
244	Konstruksi Jalan Raya	42101	B1	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1	X	B1,B2	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	
245	Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang	42102	B1	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B3,B4	B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	
246	Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel	42103	B1	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B3,B4	B1,B4	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	
247	Konstruksi Terowongan	42104	B1	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B3,B4	B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	
248	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	42912	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	
249	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	42913	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	
250	MCK Umum	37011	X	B4	B4	B4	B4	B4	X	X	T1,T2,B4	T1,T2,B4	T1,T2,B4	T1,T2,B4	T1,T2,B4	T1,T2,B4	T1,T2,B4	T1,T2,B4	T1,T2,B4	T1,T2,B4	T1,T2,B4	T1,T2,B4	T1,T2,B4	
251	Gedung Parkir	52215	X	X	X	X	X	X	X	X	B4,B5	B4,B5	B4,B5	B4,B5	B4,B5	B4,B5	B4,B5	B4,B5	B4,B5	B4,B5	B4,B5	B4,B5	B4,B5	
H.	PERTANIAN																							
252	Pertanian Padi	0112	B1,B3	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
253	Pertanian Serealia (Bukan Padi),Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak (Lahan Kering)	0111	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	
254	Tanaman Sayuran,Buah dan Aneka Umbi (Hortikultura)	0113	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	
255	Perkebunan Tanaman Rempah-rempah,Aromatik/Penyegar,Narkotik dan Obat	0128	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	
256	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	01262	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	
257	Perkebunan Agrobisnis	01220	B1	I	I	I	I	I	X	I	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	T1,B1,B3	
258	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman	"01301","01302"	B1,B3	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	
259	Pergudangan Hasil Panen (Jasa Penunjang Pertanian)	01630	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	
260	Lumbung,Pengolahan Pertanian (Jasa Penunjang Pertanian)	01611	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	
261	Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan (Jasa Penunjang Pertanian)	01630	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	
262	Wisata Agro	93231	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
263	Perdagangan Besar Beras	46311	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	
I.	PETERNAKAN																							
264	Penggembalaan Hewan	01629	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	X	X	X	X	
265	Peternakan Sapi dan Kerbau	0141	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3	X	X	X	X	
266	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	01420	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3	X	X	X	X	
267	Peternakan Unta dan Sejenisnya	01430	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3	X	X	X	X	
268	Peternakan Domba dan Kambing serta Kandang Hewan	01442	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3	X	X	X	X	
269	Peternakan Babi	01450	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
270	Ternak Unggas	0146	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3	X	X	X	X	
271	Peternakan Domba dan Kambing	0144	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3	X	X	X	X	
272	Rumah Walet	01497	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3	X	X	X	X	
273	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	0172	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	X	X	X	X	

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA												
			Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			PS	RTH 1	RTH 2	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BA	P-2	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-1	K-2	KT	PP	TR	HK
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Air	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
J.	**PERIKANAN**																						
274	Tambak Garam	08930	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
275	Budidaya Ikan Air Tawar	0322	B1,B3	X	X	X	X	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X
276	Pemancingan	"93244","93245"	B1,B3	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X
K.	**PERUNTUKAN LAINNYA**																						
277	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	42201	B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	B1,B4	B1	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4
278	Konstruksi Bangunan Pengolahan Air Bersih	42202	B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	B1	T1,B1	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4
279	Treatment Air	3600	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3
280	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	42207	B1	T1,B1	T1,B2	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1,B4	T1,B1	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4
281	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	38110	X	T1,B1,B4	T1,B1,B5	T1,B1,B4	X	T1,B4	X	T1,B4,B1	T1,B4,B1	T1,B4,B1	T1,B4,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	T1,B1
282	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS3R	38211	X	X	X	X	X	X	X	T1,B4,B1	T1,B4,B1	T1,B4,B1	T1,B4,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	B1	B1	T1,B1
283	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	"38301","38302"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
284	Bank Sampah	38110	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	B1,B3	B1,B3	T1,B1,B3
285	Penimbunan Barang Bekas	38110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
286	*Incenerator*	38220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3,B4
287	Daur Ulang Sampah	"38301","38302"	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	B1	B1	T1,B1
288	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	39000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3
289	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	37021	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	B1,B3	B1,B3	T1,B1,B3,B4
290	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	37022	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	X	X	X	X	X	T1,B1,B3,B4
291	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	38220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
292	Konstruksi Bangunan Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat,Cair,dan Gas	42203	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	B1,B3	B1,B3	T1,B1,B3,B4
293	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	42206	T1,B1,B2,B3	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3
294	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel	6110	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3
295	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	6120	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3
296	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	6130	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3
297	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	619	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	B1,B4
298	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	42911	B1	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	T1,B1	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4
299	Pembangkitan Tenaga Listrik	35111	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	X	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4
300	Transmisi Tenaga Listrik	35112	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4
301	Distribusi Tenaga Listrik	35113	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4
302	Penunjang Tenaga Listrik	3512	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4
303	Konstruksi Bangunan Elektrikal	42204	B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	B1,B4	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4
304	Distribusi Gas Alam Dan Buatan	35202	B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	B1,B4	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4
305	Pertambangan Biji Logam Mulia	"07301","07309"	B1,B3,B4	X	X	X	X	X	B1,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
306	Penggalian Batu,Pasir dan Tanah Liat	0810	B1,B3,B4	X	X	X	X	X	X	B1,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
307	Tempat Evakuasi Sementara	84234	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I
308	Tempat Evakuasi Akhir	84234	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I
309	Pergudangan dan Penyimpanan	5210	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X
310	Tempat Latihan Militer	42924	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1
L.	**WISATA**																						
311	Wisata Buatan	93239	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	X	T1,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	X	X	X	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	X	X	X	X
312	*Themepark*	93211	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	X	X	X	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	X	X	X	X
313	*Waterpark/Waterboom*	93211	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	X	X	X	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	X	X	X	X
314	Aktivitasi Seni Pertunjukan	9001	T1,B3,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3	X	X	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	T1,T3
315	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni	90030	T1,B3,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3	X	X	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	T1,T3
316	Kampung Wisata	91029	X	X	X	X	X	X	X	T1,B3,B5	T1,T3,B3,B5	T1,T3,B3,B5	T1,T3,B3,B5	X	X	X	T1,B3,B5	T1,B3,B5	T1,B3,B5	X	X	X	X
317	Floating Vila dan fasilitasnya	55193	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	X	X	X	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	X	X	X	X
318	Wisata Tirta	9324	T1,B1,B3,B5	X	X	X	X	X	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	X	X	X	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	X	X	X	X
319	Lapangan Golf & *Club House*	93114	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3,B5	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	X	X	X	X
320	Usaha Arena Permainan (seperti TimeZone,Kidzzania,dll)	93293	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3,B5	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	X	X	X	X
321	Toko Oleh-oleh dan Souvenir	"4771","4773","4774","4776","4778"	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	X	X	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	X	X	X	T1,T3,B1,B3,B5
322	Wisata Kuliner	5610	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	X	X	X	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	X	X	T1,B1,B3,B5	X
323	Wisata Budaya/ Religi	91029	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	T1,B1,B3,B5	X	X	T1,B1,B3,B5
324	Kebun Binatang	91031	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
325	Taman Wisata Alam	91034	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA												
			Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			PS	RTH 1	RTH 2	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BA	P-2	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-1	K-2	KT	PP	TR	HK
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Air	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
M.	KONSTRUKSI																						
326	Konstruksi Gedung Hunian	41011	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B3, B4	B1,B3,B5	B1,B3,B5	B1,B3,B5	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,B1
327	Konstruksi Gedung Perkantoran	41012	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3,B5	T3,B1,B3,B5	T3,B1,B3,B5	T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1
328	Konstruksi Gedung Industri	41013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2, B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2, B3,B4,B5	T1,T3,B1,B2,B3, B4,B5	X	X	X	X
329	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	41014	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	B3,B5	B3,B5	B3,B5	T1,T3,B1,B3, B5	X	X	T1,T3,B1,B3, B5
330	Konstruksi Gedung Kesehatan	41015	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	B1,B3	B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	X	X	B1,B3
331	Konstruksi Gedung Pendidikan	41016	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	B1	B1	B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	X	X	B1
332	Konstruksi Gedung Penginapan	41017	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	B1,B3,B5	B1,B3,B5	B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3, B5	X	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5
333	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	41018	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3, B5	X	X	T1,T3,B1,B3, B5
334	Pengerukan	42914	T1,B1,B3,B4	T1,B1,B3,B4	X	X	X	X	T1,B1,B3, B4	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3
335	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	42915	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
336	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	42916	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
337	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	42918	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3, B5	T1,T3,B1,B3,B5	T1,T3,B1,B3, B5	X	X	T1,T3,B1,B3, B5
338	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	42919	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X	B1,B4	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3
339	Pembongkaran	43110	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
340	Penyiapan Lahan	43120	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3
341	Konstruksi Khusus Lainnya	43909	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1

Keterangan :

I = Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan

T = Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas

klasifikasi T1 berupa pembatasan pengoperasian kegiatan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan, dapat berupa:
1. waktu operasi, berupa durasi dan/atau jam operasi kegiatan;
2. pembatasan intensitas kegiatan, berupa jumlah tenaga kerja dan/atau sarana prasarana yang dipergunakan;
3. pengembangan dan peningkatan kapasitas kegiatan atau usaha lebih lanjut tidak diperkenankan;
4. pembatasan waktu pemanfaatan lahan; dan
5. pembatasan penggunaan, pemanfaatan dan pelayanan utilitas, berupa air bersih, air minum, air limbah, persampahan, listrik, telekomunikasi, dan lainnya, yang harus terukur dan tidak menimbulkan gangguan terhadap pengguna layanan utilitas publik lainnya di lingkungan sekitarnya.

klasifikasi T2 berupa pembatasan intensitas ruang atau luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam kavling tanah, dengan tujuan untuk mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya, dapat berupa:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
2. koefisien dasar hijau (KDH) minimal dinaikkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
3. pembatasan atau perubahan luasan dan penurunan ketentuan tata bangunan yang dapat meliputi luasan kavling minimal menjadi lebih luas atau menjadi lebih kecil, garis sempadan bangunan atau jarak bebas bangunan dinaikkan atau ditingkatkan.

klasifikasi T3 berupa pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus yang meliputi:
1. jumlah maksimal dibatasi hanya 1 (satu) kegiatan atau usaha untuk setiap sub Blok atau satuan unit lingkungan terkecil yang disetujui bersama masyarakat setempat dan pemerintah daerah; dan
2. kajian dengan kegiatan lain yang serupa, sejenis, dan sama di sub Blok, atau lingkungan sekitarnya.

B = Pemanfaatan Bersyarat Tertentu

klasifikasi B1 untuk kegiatan yang wajib melakukan kajian dan persetujuan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau izin ANDALALIN (dapat berupa standar teknis, rekomendasi teknis, dan dokumen andalalin) serta rekomendasi institusi/forum yang berkaitan sesuai dengan peraturan perundangan;

klasifikasi B2 kesesuaian wajib terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang bangunan, konstruksi, kesehatan dan pengelolaan lingkungan, pengamanan dan kebencanaan, keadilan sosial, dan pengembangan ekonomi;

klasifikasi B3 untuk kegiatan yang dikenakan disinsentif berupa biaya dampak pembangunan, dapat berupa:
1. biaya sosial kesehatan, berupa asuransi; jiwa, kesehatan, kebakaran, kecelakaan dan lainnya sesuai penilaian dan kebutuhan;
2. biaya lingkungan, berupa biaya jaminan atau garansi lingkungan untuk pemulihan dan penanggulangan dampak, dan lainnya sesuai penilaian dan kebutuhan); dan
3. penyediaan prasarana sarana lebih dari yang diwajibkan dan disarankan untuk mendukung kegiatan sehingga dapat menghilangkan atau meminimalkan dan mengurangi dampak negatif menjadi lebih kecil dan dapat diabaikan.

klasifikasi B4 Diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana, prasarana dan/atau ketentuan khusus lainnya yang dapat meminimalisir banjir atau genangan perkotaan seperti lubang biopori, sumur resapan dan/atau kolam injeksi

Klasifikasi B5 Diizinkan dengan syarat wajib menyediakan ruang terbuka hijau dan/atau kegiatan dengan konsep ramah lingkungan yang dapat membantu nilai kualitas ruang terbuka hijau seperti penyediaan taman vertikal, *roof garden* dan sebagainya berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis terkait .

X = Pemafaatan Tidak Diizinkan (Dilarang)

BUPATI MAMUJU TENGAH,

H. Aras Tammauni

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2023-2042

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,6
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	30%
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
		2 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	- jalan arteri	-
	- jalan kolektor	-
	- jalan lokal	-
	- jalan lingkungan	-
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	15 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	15 meter
e.	Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. jaringan jalan dan pedestrian sepanjang tepian sempadan sungai dengan lebar minimal 4 (empat) meter; b. jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait; dan a. sarana prasarana transportasi air meliputi jembatan dan pencahayaan jembatan; b. pengelolaan sampah, meliputi menyediakan tempat sampah individual/bak sampah; c. tempat evakuasi sementara berupa bangunan dan atau bukit penyelamatan; d. jalur evakuasi dan *signage*/penanda/rambu evakuasi bencana dan sistem peringatan dini bencana.	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	5%
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
		-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	- jalan arteri	-
	- jalan kolektor	-
	- jalan lokal	-
	- jalan lingkungan	-
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
e.	Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (*porous/permeable material*) dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; b. tutupan vegetasi tanaman dengan kerapatan tinggi dan mengelompok dengan luasan minimum 0,25 (nol koma dua lima) hektar per kelompok vegetasi; c. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; d. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 8 (delapan) meter; e. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; f. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup; g. penyediaan tempat parkir; h. penyediaan penerangan ruang terbuka hijau; i. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja; j. fasilitas sosial budaya terbatas meliputi *forest trail, canopy walk, viewing deck*, menara pandang; k. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai oleh anak remaja; l. *signage*/penanda/rambu evakuasi bencana; m. sistem peringatan dini; dan n. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
		2 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	- jalan arteri	15 meter
	- jalan kolektor	10 meter
	- jalan lokal	5 meter
	- jalan lingkungan	5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	10 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	10 meter
e.	Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (*porous/permeable material*); b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; c. vegetasi tanaman hijau; d. lapangan terbuka tanpa perkerasan; e. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; f. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter; g. saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; h. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (*rain garden*) dan biopori; i. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup; j. penyediaan tempat parkir; k. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai oleh anak remaja; l. tersedia toilet dan mushola atau langgar; m. fasilitas keamanan pos jaga; n. fasilitas pusat informasi pengunjung; o. *signage*/penanda/rambu evakuasi bencana; p. sistem peringatan dini; dan q. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
		2 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	- jalan arteri	15 meter
	- jalan kolektor	5 meter
	- jalan lokal	5 meter
	- jalan lingkungan	5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (*porous/permeable material*); b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; c. taman bermain dan atau rekreasi; d. lapangan olahraga luar ruangan; e. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; f. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter; g. saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; h. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (*rain garden*) dan biopori; a. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup; b. penyediaan tempat parkir; c. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja; d. fasilitas keamanan pos jaga; e. *signage*/penanda/rambu evakuasi bencana; f. sistem peringatan dini; dan g. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	80%
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
		-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	- jalan arteri	10 meter
	- jalan kolektor	5 meter
	- jalan lokal	5 meter
	- jalan lingkungan	5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
e.	Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (*porous/permeable material*) dan dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; b. lampu jalan; c. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; d. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup dan penyediaan tempat parkir; e. tersedia RTNH berupa lahan parkir minimal 3% (tiga persen) dari luas zona; f. tersedia falitas pendukung seperti gazebo, pagar pembatas, langgar atau mushola, dan toilet umum; g. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; h. sistem peringatan dini; dan i. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
		1 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	- jalan arteri	10 meter
	- jalan kolektor	5 meter
	- jalan lokal	3 meter
	- jalan lingkungan	3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
e.	Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (*porous/permeable material*) dan dilengkapi dengan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; b. tersedia RTH taman bermain atau rekreasi; c. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga *outdoor*; d. lampu jalan; e. penanda/rambu-rambu; f. tersedia hidran umum dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; g. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 jalur 2 arah, lebar perkerasan minimum 8 (delapan) meter; h. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; i. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup dan penyediaan tempat parkir; j. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; k. sistem peringatan dini; dan l. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Zona Badan Air dengan Kode BA

Sub-Zona Badan Air dengan Kode BA		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Pengaturan hanya pada luas bangunan, ketinggian bangunan dan jumlah lantai berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis yang menangani pemanfaatan dan perlindungan badan air
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
d.	luas kaveling minimum	
e.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
		-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	- jalan arteri	-
	- jalan kolektor	-
	- jalan lokal	-
	- jalan lingkungan	-
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
e.	Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. jalur pedestrian atau pejalan kaki, meliputi barrier jalur hijau; b. pengelolaan sampah, meliputi menyediakan alat angkut sampah menuju TPS, TPST dan/atau TPST-3R (gerobak, motor gerobak, kapal penangkap sampah sungai) (pengumpulan kolektif/bersama); c. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; d. sistem peringatan dini; dan e. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	5%
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 meter
		1 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	- jalan arteri	15 meter
	- jalan kolektor	10 meter
	- jalan lokal	5 meter
	- jalan lingkungan	5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	10 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	10 meter
e.	Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan; b. jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah; c. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air; d. penyediaan saluran drainase; e. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; f. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik; g. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen tanaman pangan dan peralatan pertanian; h. sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi; i. akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian; j. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; k. sistem peringatan dini; dan l. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	72 m^2
e.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
		3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	- jalan arteri	½ Rumija +1 meter
	- jalan kolektor	½ Rumija +1 meter
	- jalan lokal	½ Rumija +1 meter
	- jalan lingkungan	½ Rumija +1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0 meter
e.	Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. tersedianya fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau; b. penerangan jalan; c. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; a. tersedia RTH berupa taman lingkungan, taman kelurahan, taman kecamatan dan taman kota; b. tersedia RTNH berupa lapangan, tempat parkir umum, taman bermain dan rekreasi, dan trotoar; c. hidran umum dengan jarak maksimal 200 (dua ratus) meter dari jarak hidran satu ke hidran yang lainnya dan jalan lingkungan perumahan dengan lebar minimal 3 (tiga) meter tanpa membentuk *culdesac*; d. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok; e. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site, drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar; f. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site; g. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; h. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar; i. untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2	
	j. fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa berupa toko yang berskala kelurahan dan kecamatan, sarana pelayanan umum yang berupa sarana yang dapat mendukung kegiatan pelayanan perumahan seperti sekolah, peribadatan dan sebagainya; k. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; l. sistem peringatan dini; dan m. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15%
d.	luas kaveling minimum	72 m^2
e.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
		3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	- jalan arteri	½ Rumija +1 meter
	- jalan kolektor	½ Rumija +1 meter
	- jalan lokal	½ Rumija +1 meter
	- jalan lingkungan	½ Rumija +1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
e.	Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. tersedianya jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan luas 5,6 m^2 (lima koma enam meter persegi) atau pejelan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga orang atau menit atau meter dan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau; b. penerangan jalan; c. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; d. tersedia RTH berupa taman lingkungan, taman kelurahan, taman kecamatan dan taman kota; e. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga; f. hidran umum dengan jarak maksimal 200 (dua ratus) meter dari jarak hidran satu ke hidran yang lainnya dan jalan lingkungan perumahan dengan lebar minimal 3 (tiga) meter tanpa membentuk culdesac; g. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya serta diangkut gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan sampah organik dilakukan dalam lubang biopori setiap blok; h. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem *off site*; i. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; j. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar; k. untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik di depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun/apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal; l. fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa berupa toko yang berskala kelurahan dan kecamatan, sarana pelayanan umum yang berupa sarana yang dapat mendukung kegiatan pelayanan perumahan seperti sekolah, peribadatan dan sebagainya; m. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi dan sistem peringatan dini; dan n. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.dan sebagainya.	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	25%
d.	luas kaveling minimum	72 m^2
e.	koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
		3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	- jalan arteri	½ Rumija +1 meter
	- jalan kolektor	½ Rumija +1 meter
	- jalan lokal	½ Rumija +1 meter
	- jalan lingkungan	½ Rumija +1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. tersedianya jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau; b. penerangan jalan; c. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; d. tersedia RTH berupa taman rekreasi skala RT atau RW dan RTH privat bagi rumah berlantai dua atau lebih wajib menerapkan konsep *green roof*; e. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga; f. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter atau detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal 30 menit; g. hidran umum memiliki jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan, dan jalan lokal serta lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model culdesac, model T, rotary atau melingkar. h. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter; i. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 m^3 (satu koma lima meter kubik) dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4	
	j. tersedia prasarana pembuangan limbah sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site, drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar k. untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal; l. penyediaan lahan umum untuk area hunian skala RT dengan jumlah 250 penduduk memiliki standar penyediaan 100 m^2 (seratus meter persegi) dan skala RW dengan jumlah 2.500 penduduk memiliki standar penyediaan 400 m^2 (empat ratus meter persegi) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan, penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kelurahan dengan jumlah 30.000 penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m^2 (dua ribu meter persegi), dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan seluas 1.000 m^2 (seribu meter persegi) dan pangkalan oplet atau angkot seluas 200 m^2 (dua ratus meter persegi); m. penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kecamatan dengan jumlah penduduk sebesar 120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m2 (empat ribu meter persegi), dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan seluas 2.000 m^2 (dua ribu meter persegi) dan pangkalan oplet atau angkot seluas 500 m^2 (lima ratus meter persegi); n. fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa, sarana kesehatan, Sarana Pelayanan Umum, TPS, limbah domestik terpadu yang dikembangkan secara bersyarat berdasarkan pada jumlah luas maksimal, skala pelayanan dan jam operasional, dan minimarket, pertokoan, penyediaan jasa, sarana pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi, lapangan parkir yang dikembangkan secara terbatas berdasarkan pada jumlah luas maksimal, skala pelayanan dan jam operasional; o. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; p. sistem peringatan dini; dan q. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	18 meter
		3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	- jalan arteri	½ Rumija +1 meter
	- jalan kolektor	½ Rumija +1 meter
	- jalan lokal	½ Rumija +1 meter
	- jalan lingkungan	½ Rumija +1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	bangunan dengan 1 (satu) lantai minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan 1 (satu) lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (nol koma lima) meter hingga jarak bebas samping terjauh minimum 3 (tiga) meter dari batas kavling
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	bangunan dengan 1 (satu) lantai minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan 1 (satu) lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (nol koma lima) meter hingga jarak bebas belakang terjauh minimum 3 (tiga) meter dari batas kavling
e.	Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak; c. penerangan jalan; d. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, hutan kota, zona penyangga; e. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot; f. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air; g. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; h. penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran; i. meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; j. penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan k. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; l. memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.	

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1	
	m. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik; n. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; o. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan; p. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir; q. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air ; r. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan; s. toilet; t. pos jaga keamanan; u. tempat ibadah; v. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; w. sistem peringatan dini; dan x. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
		2 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	- jalan arteri	½ Rumija +1 meter
	- jalan kolektor	½ Rumija +1 meter
	- jalan lokal	½ Rumija +1 meter
	- jalan lingkungan	½ Rumija +1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	bangunan dengan 1 (satu) lantai minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan 1 (satu) lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (nol koma lima) meter hingga jarak bebas samping terjauh minimum 2,5 (dua koma lima) meter dari batas kavling
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	bangunan dengan 1 (satu) lantai minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan 1 (satu) lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (nol koma lima) meter hingga jarak bebas belakang terjauh minimum 2,5 (dua koma lima) meter dari batas kavling
e.	Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak; c. penerangan jalan; d. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, hutan kota, zona penyangga; e. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot; f. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air; g. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; h. penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran; i. meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; j. penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan k. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; l. memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan. m. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik; n. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;	

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2	
	o. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan; p. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir; q. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air ; r. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan; s. toilet; t. pos jaga keamanan; u. tempat ibadah; v. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; w. sistem peringatan dini; dan x. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
		2 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	- jalan arteri	½ Rumija +1 meter
	- jalan kolektor	½ Rumija +1 meter
	- jalan lokal	½ Rumija +1 meter
	- jalan lingkungan	½ Rumija +1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	bangunan dengan 1 (satu) lantai minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan 1 (satu) lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (nol koma lima) meter hingga jarak bebas samping terjauh minimum 2,5 (dua koma lima) meter dari batas kavling
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	bangunan dengan 1 (satu) lantai minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan 1 (satu) lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (nol koma lima) meter hingga jarak bebas belakang terjauh minimum 2,5 (dua koma lima) meter dari batas kavling
e.	Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak; c. penerangan jalan; d. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, hutan kota, zona penyangga; e. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot; f. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air; g. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; h. penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran; i. meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; j. penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan k. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; l. memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan. m. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik; n. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3	
	o. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan; p. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir; q. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air ; r. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan; s. toilet; t. pos jaga keamanan; u. tempat ibadah; v. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; w. sistem peringatan dini; dan x. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Campuran dengan kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
		4 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	- jalan arteri	15 meter
	- jalan kolektor	10 meter
	- jalan lokal	5 meter
	- jalan lingkungan	5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. pos jaga/pos keamanan; b. CCTV; c. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan sesuai dengan hirarkhinya; d. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; e. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; f. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan sesuai dengan hirarkhinya; g. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; h. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan sesuai dengan hirarkhinya; i. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); j. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; k. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site; l. utilitas perkotaan sistem *ducting* bawah tanah terintegrasi; m. hidran ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; n. *emergency power supply;* o. tempat parkir sesuai standar; p. *loading dock* disamping atau belakang bangunan; q. ruang terbuka hijau privat wajib menerapkan konsep *green roof;*	

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2	
	r. RTNH dan atau ruang sektor informal; s. tempat ibadah; t. toilet; u. jalan akses minimal 4,5 (empat koma lima) meter; v. jalan akses kavling sejajar jalan utama dengan jarak minimum keluar masuk setiap 50 (lima puluh) meter pada jalan arteri dan kolektor; w. jalur hijau jalan; x. trotoar dan jalur sepeda; y. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; z. penerangan jalan dan pedestrian; aa. taman untuk tempat menunggu dan istirahat pengunjung; bb. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi; cc. sistem peringatan dini; dan dd. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
		4 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	- jalan arteri	½ Rumija +1 meter
	- jalan kolektor	½ Rumija +1 meter
	- jalan lokal	½ Rumija +1 meter
	- jalan lingkungan	½ Rumija +1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0 meter
e.	Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan kinerja pelayanan jalan B seluas 5,6 m^2 (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; c. ruang terbuka hijau berupa taman kelurahan; d. ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep *green roof*; e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; f. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3.5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit; g. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; h. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter; i. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; j. pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok; k. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem *off site;*	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1	
	l. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; m. memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah. n. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; o. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model *culdesac*, model T, *rotary*, model *grid* atau melingkar; p. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 20 (dua puluh) meter hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 7 (tujuh) meter; q. pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan; r. tempat ibadah; s. toilet; t. tempat bongkar muat; u. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; v. sistem peringatan dini; dan w. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
		3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	- jalan arteri	½ Rumija +1 meter
	- jalan kolektor	½ Rumija +1 meter
	- jalan lokal	½ Rumija +1 meter
	- jalan lingkungan	½ Rumija +1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0 meter
e.	Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan kinerja pelayanan jalan B seluas 5,6 m^2 (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; c. ruang terbuka hijau berupa taman RW; d. ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep *green roof*; e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; f. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3.5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit; g. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; h. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; i. pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok; j. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem *off site;* k. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; l. memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah. m. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; n. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model *culdesac,* model T*, rotary*, model *grid* atau melingkar;	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2	
	o. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 20 (dua puluh) meter hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 7 (tujuh) meter; p. pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan; q. tempat ibadah; r. toilet; s. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; t. sistem peringatan dini; dan u. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	18 meter
		3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	- jalan arteri	½ Rumija +1 meter
	- jalan kolektor	½ Rumija +1 meter
	- jalan lokal	½ Rumija +1 meter
	- jalan lingkungan	½ Rumija +1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
e.	Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan kinerja pelayanan jalan seluas 5,6 m^2 (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dan dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; b. ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau jalan, pulau jalan, taman lingkungan, taman desa, taman kecamatan atau taman kota; c. ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 4 (empat) atau lebih wajib menerapkan konsep "*green roof*"; d. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; e. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model culdesac, model T, rotary, model grid atau melingkar; f. jaringan jalan lingkungan dalam zona perkantoran: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 8 (delapan) meter; g. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; h. saluran buangan air kotor merupakan saluran tertutup; i. instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kaveling industri, kapasitasnya memenuhi standar permintaan. Sumber air dapat berasal dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan industri; j. instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber listrik dapat disediakan oleh PLNi; k. penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; l. jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani perkantoran dengan sistim kabel atas atau pun kabel bawah tanah;	

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT	
	m. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 (seratus dua puluh sampai dua ratus empat puluh) liter dengan roda atau container volume 1 m^3 (satu meter kubik) beroda, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup; n. letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar; o. menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; p. penyediaan tempat parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan; q. fasilitas pendukung dapat berupa kantin, toilet, sarana ibadah, rumah, halte angkutan umun, areal penampungan limbah padat, pelayanan telekomunikasi dan keamanan; r. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; s. sistem peringatan dini; dan a. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	50%
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
		2 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	- jalan arteri	½ Rumija +1 meter
	- jalan kolektor	½ Rumija +1 meter
	- jalan lokal	½ Rumija +1 meter
	- jalan lingkungan	½ Rumija +1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
e.	Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. jaringan jalan; b. penerangan jalan dan pedestrian; c. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan sesuai dengan hirarkhinya; d. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; e. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan sesuai dengan hirarkhinya; f. tersedia pasokan air dan tidak menggunakan air tanah setempat dalam proses produksi dan kegiatan penunjang lain; g. tersedia sistem pembuangan limbah cair yang baik untuk fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah yang menghasilkan limbah; h. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; i. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; j. fasilitas toilet pria, toilet wanita; k. tempat ibadah dan kantor pengelola; l. bengkel dan tempat cuci kendaraan; m. taman; n. fasilitas keamanan pos jaga & infomasi; o. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; p. sistem peringatan dini; dan q. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	50%
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
		2 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	- jalan arteri	½ Rumija +1 meter
	- jalan kolektor	½ Rumija +1 meter
	- jalan lokal	½ Rumija +1 meter
	- jalan lingkungan	½ Rumija +1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
e.	Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. jaringan jalan; b. penerangan jalan dan pedestrian; c. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; d. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan sesuai dengan hirarkhinya; e. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; f. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan sesuai dengan hirarkhinya; g. tersedia pasokan air dan tidak menggunakan air tanah setempat dalam proses produksi dan kegiatan penunjang lain; h. tersedia sistem pembuangan limbah cair yang baik untuk fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah yang menghasilkan limbah; i. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; j. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; k. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; l. penyediaan akses bagi orang disabilitas; a. fasilitas toilet pria, toilet wanita; b. tersedia prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran; c. taman; d. fasilitas keamanan pos jaga & infomasi; e. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;	

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR	
	f. sistem peringatan dini; dan g. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
		3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	- jalan arteri	15 meter
	- jalan kolektor	10 meter
	- jalan lokal	5 meter
	- jalan lingkungan	5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
e.	Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung (lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau); b. jalan keluar masuk lebih dari 2 (dua) jalur dengan kekuatan jalan 4 (empat) ton; c. pos pengamanan dan informasi; d. terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum; e. instalasi listrik dilengkapi dengan *emergency power supply*; f. terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian; g. terdapat jaringan air termasuk instalasi air minum; h. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; i. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase; j. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; k. tersedia prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran; l. bengkel; m. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; n. lapangan olahraga dan apel; o. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; p. tempat ibadah; q. toilet;	

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK	
	r. prasarana pengamanan lainnya; s. lain-lain yang dianggap perlu oleh TN; t. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; u. sistem peringatan dini; dan v. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

BUPATI MAMUJU TENGAH,



HAJARAS TAMMAUNI

750005 753005 756005mT

119°15'0" 119°16'30" 119°18'0"

9773995 9773995 mU

2°3'0" 2°3'0" LS

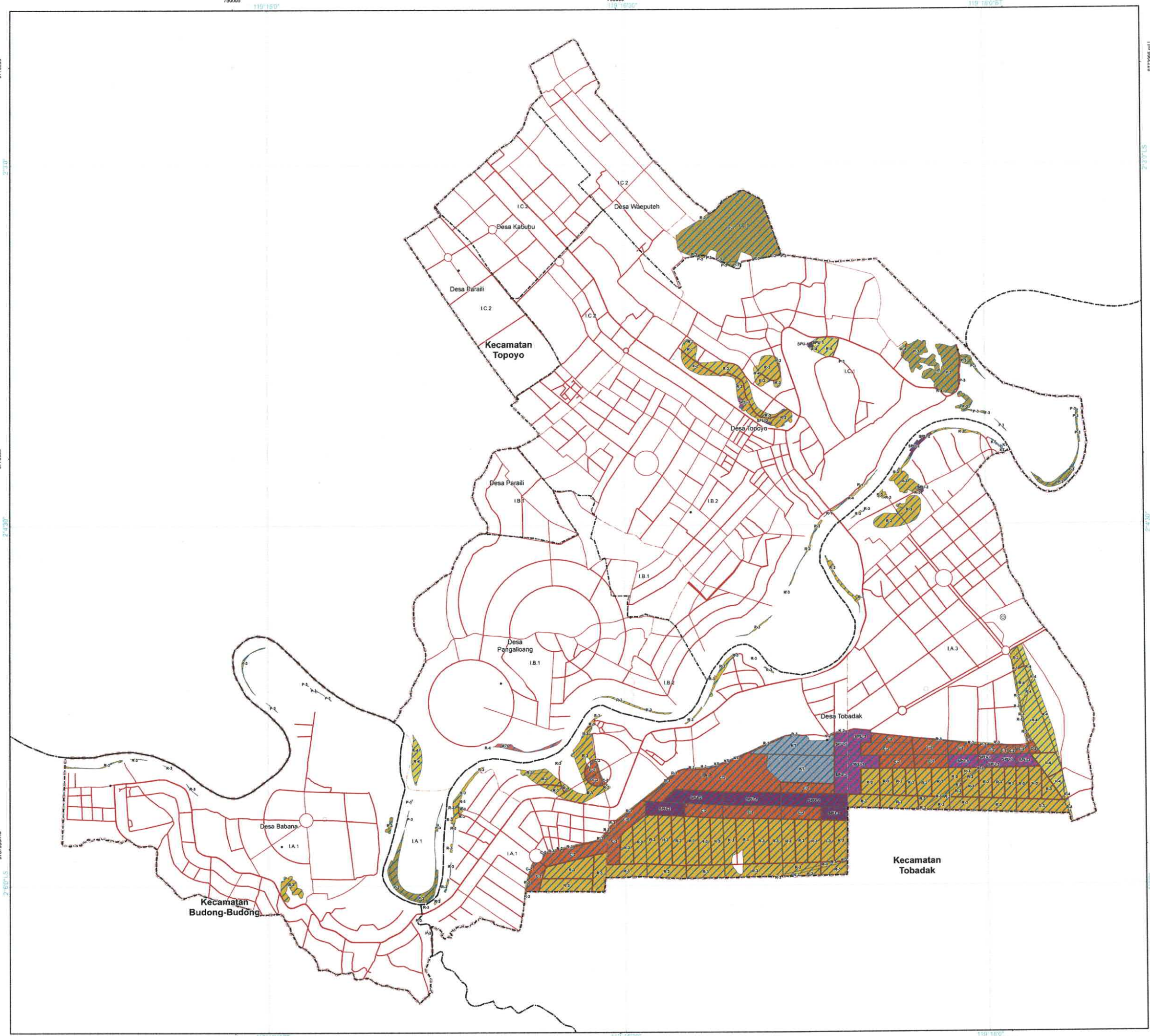
2°4'30" 2°4'30"

9770995 9770995

9767995mU 9767995

2°6'0" 2°6'0"

mT 750005 119°15'0" 753005 119°16'30" 756005 119°18'0"



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK
TAHUN 2023-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Badan Jalan
- Badan Jalan

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian
- P-3 Perkebunan

Zona Perumahan
- R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Campuran
- C-2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Ketentuan Khusus

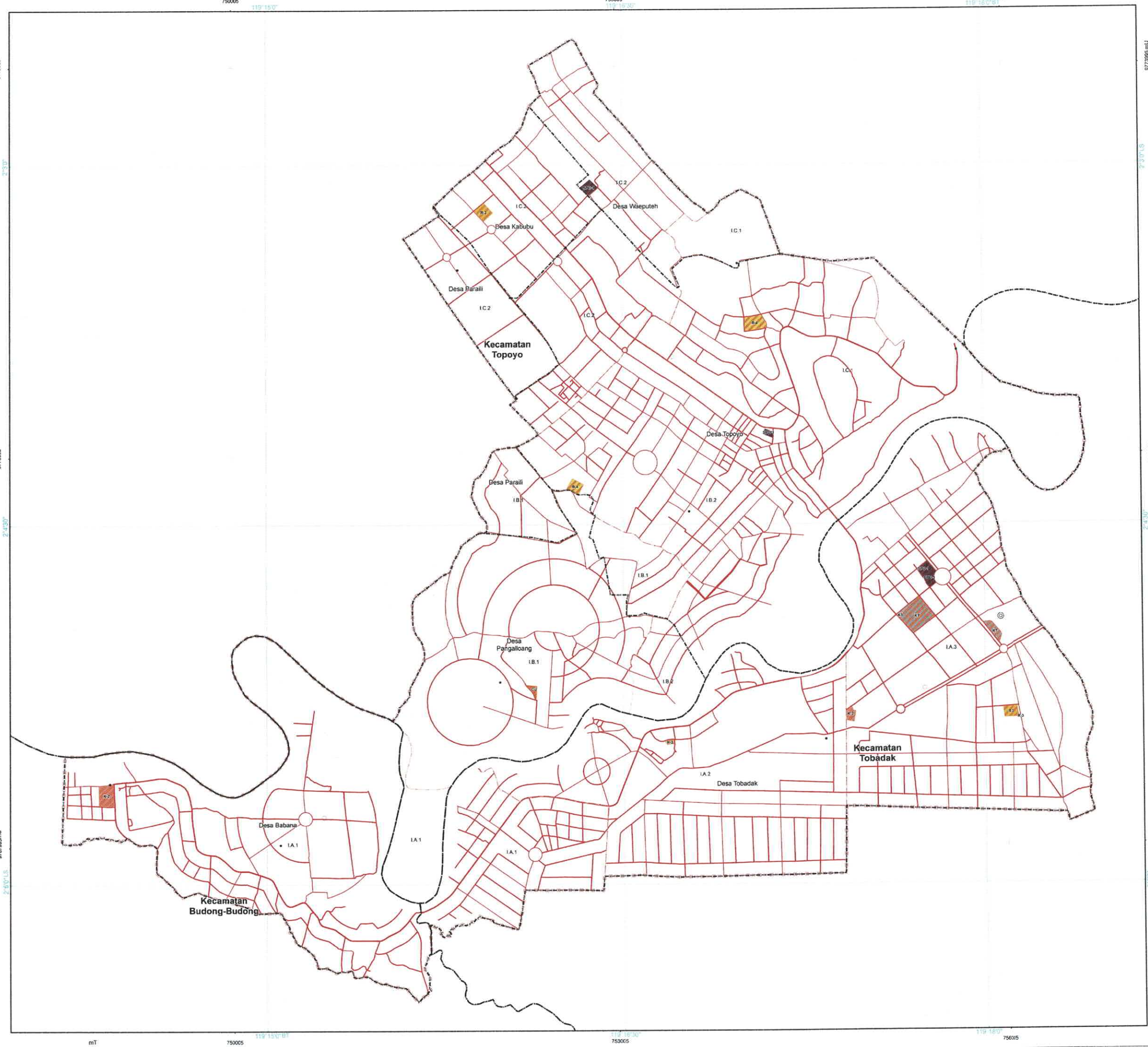
Kawasan Rawan Bencana
- Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2021
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8625/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2020
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.50/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2023 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Pada Kelompok Hutan Sungai Lumu, Kelompok Hutan Gunung Kapal, Dan Kelompok Hutan Budong-Budong Seluas 24.999.465 M2 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima) Melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Kelompok Masyarakat Di Desa Batuparigi, Desa Kambubong, Desa Salulebo, Desa Sibatta, Desa Tasokko, Dan Desa Tumbu Pada Kecamatan Kardesa, Kecamatan Pangale, Kecamatan Tobadak, Dan Kecamatan Topoyo Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria Di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat

Mengetahui,
BUPATI MAMUJU TENGAH

H. Aras Tammauni



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK
TAHUN 2023-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA

U

SKALA : 1:14.000

0 — 0,375 — 0,75 — 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Badan Jalan
- Badan Jalan

RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA

Zona Perumahan
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Campuran
- C-2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 SPU Skala Kota

Ketentuan Khusus

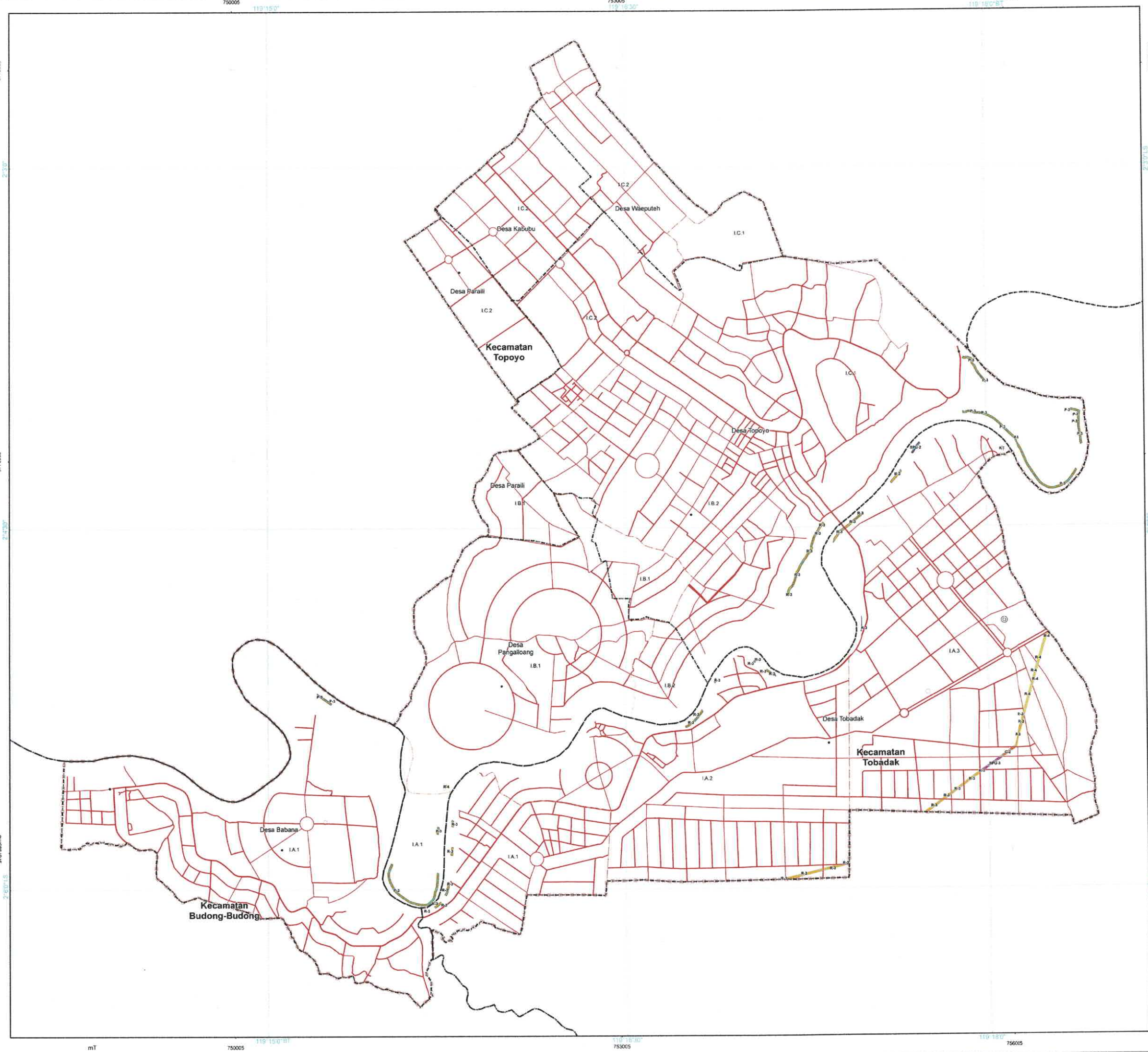
Tempat Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Sementara
- Tempat Evakuasi Akhir

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2021
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6625/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2020
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.50/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2023 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Pada Kelompok Hutan Sungai Luma, Kelompok Hutan Gunung Kapal, Dan Kelompok Hutan Budong-Budong Seluas 24.396.455 M2 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima) Melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Kelompok Masyarakat Di Desa Batupanga, Desa Kanjunong, Desa Salulebo, Desa Sibatta, Desa Tasokko, Dan Desa Tambu Pada Kecamatan Karossa, Kecamatan Pangale, Kecamatan Tobadak, Dan Kecamatan Topoyo Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria Di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat

Mengetahui,
BUPATI MAMUJU TENGAH

H. Aras Tammauni



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK
TAHUN 2023-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Badan Jalan
- Badan Jalan

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian
- P-3 Perkebunan

Zona Perumahan
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Campuran
- C-2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Ketentuan Khusus

Kawasan Sempadan
- Sempadan Ketenagalistrikan
- Sempadan Sungai

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2021
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6625/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2020
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.50/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2023 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Pada Kelompok Hutan Sengan Lumu Kelompok Hutan Gunung Kapal, Dan Kelompok Hutan Budong-Budong Seluas 24.999.468 M2 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima) Meliputi Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Kelompok Masyarakat Di Desa Batuparigi, Desa Kandunong, Desa Salulebo, Desa Sibatta, Desa Tasokko, Dan Desa Tumbu Pada Kecamatan Karassa, Kecamatan Pangale, Kecamatan Tobadak, Dan Kecamatan Topoyo Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria Di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat

Mengetahui,
BUPATI MAMUJU TENGAH

H. Aras Tammauni